TABLOID Sinar Tani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id
www.sinartani.co.id

Edisi 24 - 30 Desember 2025
No. 4116
Tahun LVI



7 Catatan Pangan 2025

10 Sudaryono: 6,5 Tahun Kuliah di IPB, Sulit dan Jelimet

15 Puncak Musim Hujan, Waspadi Busuk Daun Kentang Mengintai



www.tabloidsinartani.com tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV



EDITORIAL

Selamat Tinggal Tahun 2025

"Pangan sebagai persoalan hidup atau mati suatu bangsa." Pernyataan Bung Karno pada peletakan batu pertama gedung Fakultas Pertanian UI (Sekarang IPB) tanggal 27 April 1952 mengandung berbagai aspek penting antara lain bahwa pangan merupakan hal yang mendesak dan harus menjadi prioritas utama.

Begitu juga bagi Pemerintahan Prabowo Subianto yang telah berjalan 1 tahun 2 bulan ini. Saat pertama kali dilantik menjadi Presiden, Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan. Bahkan dalam berbagai kesempatan, ia juga selalu mendengungkan hal tersebut. Nada yang sama juga dilontarkan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Apa yang pemerintah lakukan untuk mencapai target tersebut? Trasnformasi besar-besaran pertanian pun dilakukan. Dalam kebijakan dan regulasi, pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan nilai mencapai Rp 1,7 triliun dan efisiensi anggaran berbasis output. Sebagai salah satu penyokong peningkatan produksi pertanian, pemerintah juga mederegulasi 145 aturan pupuk bersubsidi.

Kemudian menerbitkan 17 Perpres/Inpres, seperti Inpres terkait penyuluh pertanian, irigasi dan Perpres mengenai tata kelola pupuk subsidi. Untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah, pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung, serta Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

Dalam bidang infrastruktur, pemerintah mencanangkan perbaikan irigasi 2,3 juta ha, pemberian bantuan alsintan sebanyak 166.839 unit, penambahan alokasi pupuk subsidi sebanyak 4,82 juta ton, sehingga kini menjadi 9,5 juta ton, serta pemenuhan benih unggul.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga memprogramkan intensifikasi melalui optimasi lahan seluas 848 ribu ha, pompanisasi 1 juta ha. Kemudian ekstensifikasi dengan cetak sawah seluas 225 ribu ha dan pengembangan padi gogo seluas 253,1 ribu ha.

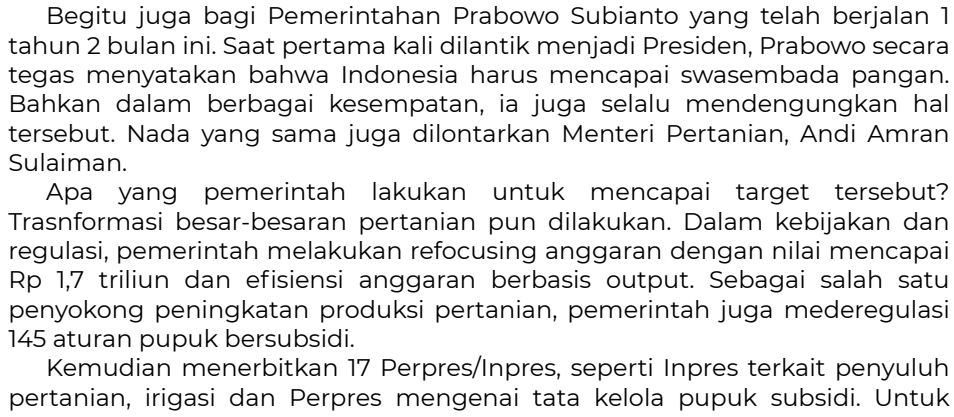
Sedangkan dalam bidang SDM, pemerintah akan menarik penyuluh pertanian daerah ke pusat sebanyak 30.320 pegawai. Sebagai salah startegi regenerasi petani, pemerintah membentuk Brigade Pangan yang didalamnya merupakan petani milenial/GenZ.

Namun untuk menggapai kecukupan pangan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas mengonsumsi beras bukan persoalan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Konversi lahan terus menggerus lahan pertanian produktif. Program cetak sawah juga masih ditunggu hasil nyatanya.

Selama setahun ini, banyak dinamika dalam perjalanan pembangunan pertanian. Misalnya, di tengah euforia peningkatan produksi beras, ternyata harga beras naik di pertengahan tahun. Pemerintah akhirnya turun tangah dengan menggelontorkan beras murah SPHP yang djual dengan harga Rp 62.500/sak (5 kg) dan melepas bantuan pangan dalam dua periode Mei-Juni dan September-Oktober.

Bahkan menjelang akhir November, pemerintah terusik dengan masuknya beras impor asal Thailand melalui Pelabuhan Sabang dan Batam. Kedua pelabuhan tersebut memang termasuk Free Trade Zone (Kawasan Bebas Perdagangan). Jumlahnya memang hanya sekitar 250 ton melalui Sabang dan 40 ton melalui Batam. Tapi masuknya beras tersebut ibarat kata pepatah "karena nila setitik rusak susu sebelanga".

Meski ada riak pembangunan pertanian selama 2025, apresiasi banyak pihak memberikan apresiasi dalam upaya peningkatan produksi beras. Namun demikian, tetap masih banyak catatan dan pekerjaan rumah pemerintah di tahun 2026.



MENYAPA



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Selamat Tahun Baru 2026

Selamat Tahun Baru 2026. Menjelang tutup tahun 2025, kami berharap harga semua komoditas pangan tidak naik. Ketersediaan stok pangan nasional saat ini sangat mencukupi, sehingga tidak ada alasan harga kebutuhan pokok beras, minyak goreng, dan komoditas strategis lainnya mengalami lonjakan.

Produksi ada, stok ada. Beras kita tertinggi sepanjang sejarah republik ini, minyak goreng juga berlimpah. Kalau harga masih naik, berarti ada yang tidak beres di tata niaga. Stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 3,7 juta ton.

Bahkan diperkirakan meningkat hingga 6–7 juta ton pada April mendatang, seiring penyerapan gabah petani yang terus dilakukan dengan mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kalau kita ingin petani sejahtera, HPP harus dipatuhi. Jangan harga ditekan di petani, tapi dinaikkan ke konsumen. Itu tidak adil.

Pemerintah menekankan bahwa HET bukan untuk merugikan pedagang, melainkan menciptakan keseimbangan agar semua pihak diuntungkan. Dengan HET yang dipatuhi, petani mendapatkan harga layak, pedagang memperoleh margin wajar, dan konsumen terlindungi dari lonjakan harga.

Menjelang momentum Nataru, kami juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memainkan harga demi keuntungan tidak wajar. Kami menegaskan pemerintah tidak akan ragu bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja menaikkan harga dan merugikan rakyat. Saya tidak menularkan penyakit, tapi yang menaikkan harga, saya pastikan saya 'vertigokan'. Percaya sama saya.

Kami ingin sampaikan penegakan hukum di sektor pangan terus berjalan. Hingga kini, 75 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan kecurangan distribusi pangan, serta ribuan izin usaha dicabut di sektor beras, minyak goreng, pupuk, dan komoditas lainnya. Itu bukan kesalahan biasa. Itu penipuan, titik. Dan negara harus hadir melindungi rakyat.

Untuk itu, Pemerintah mengajak seluruh pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan pangan untuk mematuhi HET dan HPP, menjaga tata niaga yang jujur dan berkeadilan, agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang, harga stabil, dan pasokan aman.

Pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Penindakan akan langsung dilakukan jika ditemukan pelanggaran. Kami, pemerintah dan pelaku usaha sepakat menjaga harga tetap sesuai ketentuan.

Pemerintah kini akan mengedepankan langkah tegas melalui pengawasan dan penindakan langsung di lapangan. Saya sampaikan semua jangan melanggar HET. Jika melanggar HET, kita tindak. Bukan lagi imbauan. Masa imbauan sudah selesai. Kalau melanggar HET, kita tindak dan Satgas Pangan langsung turun.

Penegakan HET ini didukung kondisi pasokan pangan nasional yang sangat mencukupi. Seluruh komoditas strategis dipastikan aman, sehingga tidak ada alasan harga melonjak.





Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Freepik.com (diolah)

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. No rekening 1270096016587; Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586;
Percetakan: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Cuan Budidaya Kelapa, Kenali Karakter Jenisnya

Pemerintah saat ini tengah mendorong hilirisasi kelapa. Dorongan ini menjadi peluang emas bagi petani. Sebelum memulai usaha budidaya kelapa, mengenal karakter si nyiur melambai menjadi langkah awal. Dari tipe akar, kebutuhan lahan, hingga potensi hasil, kelapa bukan sekadar pohon, tapi investasi jangka panjang yang menjanjikan.



Tanaman kelapa hari ini tak lagi cukup diperlakukan sebagai tanaman warisan, tapi telah berubah menjadi instrumen usaha. Salah memilih jenis, salah menghitung umur panen, atau keliru membaca pasar, kebun kelapa malah tidak mendatangkan cuan.

Di lapangan, pertanyaan yang kerap muncul adalah: lebih menguntungkan mana, menanam kelapa tua, kelapa muda, atau kelapa genjah? Sebab tiap jenis kelapa punya tabiat sendiri mulai dari umur panen berbeda, produktivitas tak sama, dan pasar sasaran yang juga berlainan.

Di titik inilah, mengenal karakter kelapa menjadi kunci awal membangun kebun yang bukan sekadar hijau, tapi juga menghasilkan.

Kelapa Dalam

Kelapa dalam memililli batang tinggi, bisa mencapai 15–25 meter, dengan umur produktif panjang bahkan melampaui 60 tahun. Kelapa dalam mulai berbuah pada umur 6–8 tahun setelah tanam. Masa tunggu ini kerap membuat petani kecil ragu.

Namun setelah memasuki fase produksi, satu pohon bisa menghasilkan 8–12 tandan per tahun, masing-masing berisi 8–12 butir. Totalnya, sekitar 80–120 butir per pohon per tahun.

Untuk menanam Kelapa Dalam, jarak tanam lebar sekitar 8 x 8 atau 9 x 9 meter membuat populasi per hektar terbatas. Perawatannya relatif ringan, namun panen membutuhkan tenaga terampil karena tinggi pohon. Di sinilah biaya panen sering tak terasa di awal, tapi pelan-pelan menggerus margin.

Dari sisi ekonomi bahan baku, kelapa dalam adalah tulang punggung industri kopra. Daging buahnya tebal, kadar minyak tinggi, dan stabil untuk diolah menjadi minyak kelapa, VCO, santan, hingga bahan baku kosmetik.

Kelapa dalam menyasar pasar industri dan ekspor. Harga mengikuti pasar global, naik-turun seperti ombak. Saat harga jatuh, cuan menipis. Saat naik, kebun menjadi aset yang menghidupi banyak kepala keluarga. Kelapa dalam cocok bagi petani yang membangun kebun sebagai tabungan jangka panjang. Karakternya bukan untuk buru-buru, tapi kuat menopang cuan dalam waktu lama.

Kelapa Muda

Kelapa muda lebih dekat dengan suara “krek” parang dan sedotan plastik. Ia bukan varietas khusus, melainkan strategi panen. Kelapa dalam maupun genjah bisa diarahkan ke pasar ini.

Kelapa dipetik muda pada umur 6–8 bulan setelah bunga mekar. Airnya penuh, dagingnya tipis dan kenyal. Inilah yang diburu pasar minuman segar.

Panen kelapa muda bisa dilakukan lebih sering, hampir setiap bulan. Inilah daya tarik utamanya yaitu arus kas terasa hidup. Ada uang masuk rutin, cocok untuk menopang kebutuhan harian petani. Namun karakternya rapuh karena panen muda terus-menerus bisa menurunkan pembentukan buah tua. Tanpa pemupukan dan manajemen yang rapi, pohon bisa cepat lelah.

Pasar kelapa muda adalah pasar harian yakni, pedagang kaki lima, restoran, hotel, kawasan wisata, hingga acara keluarga. Harga per butir relatif lebih tinggi, tapi sangat sensitif terhadap cuaca dan tren.

Musim hujan panjang atau penurunan daya beli bisa langsung terasa di lapak. Kelapa muda cocok untuk petani dekat pasar dan jalur distribusi pendek. Ini tipe usaha cepat, cuannya juga cepat asal pasarnya ada.

Kelapa Genjah

Jika kelapa dalam adalah pelari maraton, kelapa genjah adalah sprinter. Batangnya pendek, hanya 5–10 meter, tapi mulai berbuah lebih cepat. Kelapa genjah mulai berbuah pada umur 3–4 tahun. Dalam setahun, produksinya bisa mencapai 12–15 tandan, dengan isi 10–15 butir per tandan. Secara total, produktivitasnya kompetitif.

Batang pendek memudahkan panen dan menekan biaya tenaga kerja. Jarak tanam lebih rapat seperti 6 x 6 atau 7 x 7 meter, membuat populasi per hektar meningkat. Karakternya cocok untuk kebun intensif.

Namun, umur produktifnya lebih pendek, sekitar 20–30 tahun. Ia cepat memberi hasil, tapi juga lebih cepat menua. Untuk pasar, Kelapa genjah fleksibel karena bisa masuk pasar kelapa muda, bisa pula untuk santan dan olahan rumah tangga. Daging buahnya tak setebal kelapa dalam, tapi cukup untuk UMKM. Genjah pas bagi petani yang ingin cuan lebih cepat dengan lahan terbatas, asal siap mengelola kebun secara serius.



Trik Pasar

Kesalahan klasik di sentra kelapa adalah menanam dulu, mencari pembeli belakangan. Akibatnya, produksi ada, harga tiarap. Jika di sekitar kebun berdiri pabrik pengolahan, kelapa dalam menjadi pilihan logis. Jika pasar segar mendominasi, genjah dan panen muda lebih relevan.

Skala lahan juga menentukan. Petani kecil akan berat menunggu 8 tahun tanpa pemasukan, sementara pemilik lahan luas bisa menjadikan kelapa dalam sebagai aset jangka panjang. Di sisi lain, produktivitas tinggi tak selalu berarti hasil yang besar juga.

Kelapa genjah produktif, tapi butuh pupuk dan perawatan intensif. Kelapa dalam murah perawatan, tapi lama balik modal. Kelapa muda cepat laku, tapi fluktuatif. Di banyak daerah, petani mulai meracik strategi campuran. Sebagian genjah untuk arus kas cepat, sebagian kelapa dalam untuk tabungan masa depan.

Tanaman sela seperti pisang atau nanas ikut menutup biaya awal. Kebun pun bekerja, bahkan sebelum kelapa berbuah.

Penulis : Takdir Mulyadi
Penyuluh Pertanian Pusat

REFLEKSI PERTANIAN 2025

Tanpa terasa tahun 2025 tinggal menghitung hari dan kita semua akan memasuki tahun 2026. Perjalanan panjang dunia pertanian selama tahun ini menunjukkan berbagai dinamika. Sejak awal pelantikan, Presiden Prabowo Subianto telah mengibarkan bendera tinggi swasembada pangan dengan menerbitkan berbagai kebijakan, baik bentukan Instruksi Presiden (Inpres) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Menengok ke belakang, catatan Tabloid Sinar Tani, dalam Musrenbangnas 2025 membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang berlangsung Senin (30/12), Presiden Prabowo menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi sebagai prioritas strategis nasional. Langkah ini diyakini menjadi kunci kemandirian dan kedaulatan.

Bangsa Indonesia memang bisa belajar dari dua tahun terakhir (2023-2004), saat produksi pangan (beras) menghadapi tantangan berat, pemerintah akhirnya membuka keran impor. Catatan Badan Pusat Statistika, impor beras tahun 2023 mencapai 3.06 juta ton dan tahun 2024 diperkirakan mencapai 3,8 juta ton. Padahal sejak tahun 2019 impor beras tak sampai angka 500 ribu ton.

Terbitkan Regulasi

Kemudian pada awal tahun 2025 pemerintah langsung tancap gas meluncurkan kebijakan untuk mendongkrak produksi pangan. Dalam setahun ini, Presiden Prabowo telah menerbitkan 17 Perpres/Inpres. Diantaranya, Perpres No. 06 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi. Dengan terbitnya Perpres ini, pemerintah mencabut 145 peraturan, 41 Undang-undang, 23 Peraturan Pemerintah dan 6 Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden.

Perpres yang ditandatangani 30 Januari 2025 bertujuan untuk memastikan penyaluran pupuk yang lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai dengan ketahanan pangan nasional. Ada banyak perubahan kebijakan dalam Perpres tersebut. Diantaranya, target penerima pupuk bersubidi, tidak hanya untuk petani, tapi juga pembudidaya ikan.

Jenis pupuknya juga selain Urea, ZA, SP-36 dan NPK, tapi juga pupuk organik. Selain itu, dalam distribusi, pupuk subsidi diberikan langsung ke petani atau titik serah berada di Gapoktan, Poktan dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).

Selain itu, Inpres No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemelihaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Dengan Inpres ini, pemerintah ingin melakukan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mencakup saluran, bangunan, bangunan pelengkapnya, termasuk pintu air, tanggul, dam parit, sumur, embung, instalasi pompa/pipanisasi, jaringan distribusi dan drainase.

Setidaknya ada empat instruksi utama yang tercantum dalam Inpres ini, yang berfokus pada upaya peningkatan dan perbaikan sistem irigasi di berbagai daerah. Pertama, pembangunan jaringan irigasi baru yang akan memperluas cakupan area pertanian. Kedua, rehabilitasi infrastruktur irigasi yang sudah ada untuk memastikan kelancarannya dalam mendistribusikan air secara merata.

Ketiga, pemeliharaan berkelanjutan terhadap sistem irigasi yang ada agar tetap berfungsi optimal sepanjang tahun. Keempat, peningkatan kapasitas pengelolaan irigasi di tingkat daerah untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki tim yang kompeten dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pengairan.

Pemerintah juga menarik tenaga penyuluh pertanian didaerah ke pusat dengan keluarnya Inpres No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan. Dengan keluarnya Inpres tersebut penyuluh pertanian di daerah akan menjadi pegawai pusat. Seperti diketahui, sebelumnya penyuluh pertanian yang tersebar di berbagai daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Inpres tersebut menetapkan dalam waktu 1 tahun, seluruh penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipusatkan ke Kementerian Pertanian. Dengan adanya pengalihan penyuluh ke Kementan, diharapkan pengelolaan dan koordinasi antara penyuluh dapat lebih seragam dan fokus memberikan pendampingan ke petani sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi pertanian terbaru.

Kebijakan lain, pemerintah juga menyiapkan perubahan Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Kedua, Inpres tentang Satu Komando Hulu Hilir Swasembada Pangan. Ketiga, Perpres tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian.

Untuk mengejar swasembada pangan, selain Perpres dan Inpres, pemerintah juga menerbitkan regulasi lain. Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah Dan Beras terbit 12 Januari 2025.

Namun belum berjalan satu bulan, pemerintah merevisi regulasi tersebut dengan terbitnya melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 24 tahun 2025. Dengan keluarnya keputusan tersebut, pemerintah hanya satu harga yakni Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500/kg.

Capaian 2025

Dari berbagai regulasi terkait pertanian tersebut, alhasil indikator makro pembangunan pertanian menunjukkan meningkat signifikan. PDB Pertanian 2025 13,83%, tertinggi kedua sebagai Penopang PDB Nasional. Sementara data KSA BPS menyebut produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

Kenaikan produksi tersebut kemudian diikuti dengan serapan atau pembelian gabah/beras oleh Bulog yang juga terdongkrak hingga mencapai 2,6 juta ton setara beras. Dengan sisa beras impor tahun lalu, saat ini cadangan beras pemerintah yang ada di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton. Hingga akhir tahun diperkirakan stok beras pemerintah masih sebanyak 3,6 juta ton.

Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang selama ini menjadi indikator kesejahteraan petani pada September 2025 sebesar 124,36. Sementara itu, ekspor Pertanian sampai Agustus 2025 Rp507,78 triliun naik 42,19% dibandingkan 2024. Tenaga kerja pertanian 2025 juga meningkat menjadi 38,99 juta orang atau naik 1,80% dibandingkan 2024.

Di tengah berbagai capaian tersebut, selama tahun 2025 terlihat fokus pemerintah pada pangan, khususnya pencapaian swasembada beras. Bagaimana dengan komoditas lainnya, mungkinkah tahun 2026 mendapat giliran selanjutnya? **Tim Sinta**



Tahun 2025, Bendera Swasembada Beras siap Berkibar



Di tengah berbagai tantangan dalam pembangunan pertanian seperti perubahan iklim yang kian sulit diprediksi, konversi lahan yang semakin masif, dan tantangan lainnya, kondisi pangan, khususnya beras terbilang cukup aman. Selain adanya peningkatan produksi, rasa aman tersebut nampak dari posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang hingga akhir tahun diprediksi sebanyak 3,4 juta ton.

Setelah beberapa tahun terakhir mengimpor beras, pemerintah bersiap mengibarkan bendera swasembada beras diakhir tutup tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

Lonjakan tersebut didorong kenaikan luas panen hampir 13 persen, dengan potensi produksi padi mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut diprediksi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas mengonsumi beras.

Peningkatan produksi beras Indonesia berimbas pada harga pangan dunia yang turun dari 650 dollar AS menjadi 372 dollar AS per ton. Indonesia yang sebelumnya menjadi pengimpor beras terbesar di dunia, bahkan dua tahun berturut-impornya mencapai 7 juta ton dengan nilai kurang lebih Rp 100 triliun, kini tak lagi mengimpor. Dunia kehilangan pasar beras terbesar yakni Indonesia.

Bahkan saat 1 tahun Pemerintahan Prabowo Subianto, lembaga PT Indeks Politica Indonesia (PT IPI) dalam surveinya mengungkap, masyarakat puas dengan kinerja Pemerintah. Salah satu aspek indikator kepuasaan publik yang disurvei adalah ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian. Survei menunjukkan mayoritas masyarakat masih mengandalkan sektor pertanian sebagai landasan hidup masyarakat, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi bisa lebih stabil kedepan.

Kinerja pertanian juga mendapat apresiasi dari *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO). Indonesia masuk dalam daftar penerima rekognisi atas kontribusi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dalam pembangunan sektor pangan dan pertanian dunia.

Penghargaan diserahkan pada acara Global Technical Recognition Ceremony di Kantor Pusat FAO, Roma, Italia, Rabu (15/10), dalam peringatan 80 tahun Hari Pangan Sedunia. Indonesia menjadi salah satu dari 18 penerima rekognisi KSST pada dua kategori *Country-Level Recognition* dan *Institutional-Level Recognition*.

Pada kategori Country-Level, FAO mengapresiasi peran Indonesia dalam mendorong transformasi pertanian dan ketahanan pangan global melalui program KSST yang selaras dengan FAO Strategic Framework 2022–2031 dan visi "Four Betters" (*better production, better nutrition, better environment, better life*).

Capaian Tertinggi

Optimistis pencapaian swasembada pangan disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat melaporkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa produksi beras nasional tahun 2025 mencapai capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni naik sebesar 4,1 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi beras tersebut kata Amran, juga diikuti dengan penguatan stok nasional dan pengendalian harga di pasar. "Stok beras nasional kita diproyeksikan menembus lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun. Ini juga tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kami juga laporkan kepada Presiden bahwa kondisi stok dan produksi saat ini sangat kuat untuk menjaga stabilitas pangan," tuturnya.

Optimistis pemerintah kembali disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat berdialog dengan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Selasa (16/12). Amran mengatakan, kebijakan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus swasembada pangan dan stop impor pangan. Karena itu berbagai regulasi diterbitkan pada awal tahun 2025 lalu.

"Terbukti kita lihat negara-negara lain di dunia mengapresiasi dan kita mendapat penghargaan karena berkontribusi pada dunia yakni harga pangan dari 650 dollar AS/ton turun harga menjadi 342 dollar AS/ton atau turun 40-42 persen," katanya.

Penurunan harga pangan, khususnya beras tersebut karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Padahal sebelumnya dalam 7 tahun terakhir, Indonesia adalah pengimpor beras terbesar di dunia, tapi tiba-tiba tidak impor. Bukan hanya produksi pangan yang naik, Amran mengungkapkan, ekspor juga naik 42 persen.

Pemerintah juga mengklaim kesejahteraan petani yang dihitung dari NTP (Nilai Tukar Petani) juga naik mencapai angka 124. "Saya ingat banget. Dulu NTP hanya 98, saat kami Menteri Pertanian pertama kali naik menjadi 101. Itupun setengah mati naiknya. Alhamdulillah sekarang mencapai 124, petani bahagia," tututnya.

Kenaikan kesejahteraan petani tersebut menurut Amran, karena kebijakan Presiden Prabowo. Diantaranya, menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.500/kg. Perbaikan dalam tata kelola pupuk juga berdampak pada petani untuk meningkatkan produksi tanaman.

Tak Sebatas Klaim Politik

Namun Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau lebih akrab dengan panggilan Titiek Soeharto mengingatkan, bahwa capaian swasembada pangan tidak cukup dalam bentuk angka produksi atau klaim politik. Swasembada harus melekat dengan kesejahteraan petani.

"Produksi tinggi itu penting, tapi lebih penting petani mendapatkan manfaatnya. Swasembada harus identik dengan naiknya kesejahteraan petani, bukan sekadar prestasi di atas kertas," tegasnya saat Rapat Kerja Nasional HKTI di Bogor, Rabu (3/12).

Meski capaian pertanian terlihat positif, Titiek menilai pekerjaan rumah sektor pangan masih banyak. Pemerintah dan DPR harus terus memastikan program prioritas berjalan konsisten, termasuk memperkuat hilirisasi, mengurangi ketergantungan impor, dan mengawal distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

"Kita sudah menapaki jalur yang benar, tetapi tanggung jawab kita masih panjang. Satu tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan fondasi yang kuat, tinggal bagaimana kita menjaga momentum ini agar semangat produksi petani tidak pernah padam," katanya.

Karena itu, Ia pun mengajak seluruh stakeholder pertanian, petani, penyuluh, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk bergerak bersama menjaga pertumbuhan sektor pertanian agar tetap stabil. "Kalau petani kuat, Indonesia kuat," tutup Titiek Soeharto. **Tim Sinta**

Riak Pertanian di Tahun Ular Kayu



Di tengah euforia pemerintah yang bersiap mencanangkan swasembada pangan pada akhir tahun 2025, perjalanan pertanian, khususnya pangan, dipenuhi berbagai riak. Berbagai catatan Tabloid Sinar Tani, terjadi pro kontra terhadap kebijakan pemerintah. Paling ramai mengemuka di publik adalah gejolak harga beras, kebijakan tata kelola pupuk subsidi dan penarikan penyuluh pertanian daerah ke pusat.

Berbagai regulasi telah diterbitkan pemerintah untuk mendongkrak produksi pangan. Satu kalimat, targetnya adalah pencapaian swasembada pangan (beras). Beras memang menjadi komoditas utama sebagai sumber karbohidrat masyarakat Indonesia. Karena itu, selama tahun ini pemerintah begitu 'kencang' berlari untuk mencapai target tersebut.

Tapi upaya pemerintah menembus swasembada pangan bukan jalan bebas hambatan. Kerikil dan batu kerap menyandung pemerintah. Selama tahun kayu ular, terjadi berbagai riak menjadi bumbu perjalanan pertanian selama tahun 2025.

Kenaikan Harga Beras

Di tengah optimistis pemerintah terhadap kenaikan produksi beras, serapan gabah/beras Bulog yang terus naik dan stok melimpah mencapai angka 3 juta ton, justru pada pertengah tahun 2025, harga beras bergerak naik. Kenaikan beras ini yang kemudian menjadi pertanyaan, ada apa?

Data BPS menyebutkan, tren harga beras di tingkat perdagangan besar (grosir) menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama setelah masa pandemi Covid-19. Rata-rata harga beras grosir pada Mei 2025 tercatat mencapai Rp13.735/kg. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (Mei 2024) yang berada di Rp13.471/kg, dan jauh melampaui harga pada Mei 2023 sebesar Rp12.102,7/kg.

Untuk mencegah harga beras makin melambung, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kemudian meminta Bulog menggelotorkan beras pemerintah, baik dalam bentuk bantuan pangan maupun penjualan beras SPHP. Total beras SPHP yang siap dilepas ke pasar mencapai 1,3 juta ton. Namun menurut Direktur Utama, Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani hingga akhir tahun, beras SPHP yang sudah dilepas sebanyak 897 ribu ton.

Pemerintah juga melepas beras dalam program bantuan pangan yang digelontorkan kepada 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia dengan masing-masing mendapatkan 10 kg/bulan. Selama tahun 2025, sudah dua kali pemerintah melepas bantuan pangan yakni untuk Mei-Juni, kemudian Oktober-September.

Di tengah gejolak harga beras saat produksi berlimpah tersebut, kemudian mencuat isu oplosan beras. Kasus beras oplosan tersebut menggelinding setelah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan melontarkan pernyataan kasus 212 merek beras ditemukan tidak sesuai dengan standar mutu dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di 13 laboratorium independen di seluruh Indonesia.

Kasus oplosan beras yang ramai akhir-akhir ini telah menarik Presiden Prabowo Subianto untuk ikut turun tangan. Saat peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo mengungkap adanya praktik manipulasi di pasar beras nasional. Terdapat beras kualitas eceran atau medium dikemas sebagai beras premium, lalu dijual dengan harga jauh di atas HET.

Presiden yang pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini menilai, kasus tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan penipuan, kejahatan ekonomi, dan bentuk penghianatan terhadap bangsa. Baginya, permainan harga oleh penggilingan padi besar dan produsen beras nakal telah merugikan petani

Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pembenahan ekosistem perberasan nasional dilakukan bukan hanya untuk menjaga stabilitas pangan, tetapi juga demi memastikan kesejahteraan petani terus meningkat. Ia menilai, selama bertahun-tahun ekosistem perberasan tidak sehat karena adanya praktik curang seperti beras oplosan dan permainan harga oleh segelintir pelaku usaha besar.

Kios Pupuk Tersangkut Masalah

Riak lain yang mencuat selama 2025 adalah berbagai kasus pupuk subsidi. Tata kelola pupuk subsidi yang baru tersebut memotong rantai distribusi dan memberikan kesempatan gabungan kelompok tani (gapoktan) dan koperas, termasuk Koperasi Desa Merah Putih menjadi penyalur (titik serah).

Namun di lapangan, ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak gapoktan dan koperasi yang belum siap menjadi penyalur dengan berbagai alasan. Misalnya, insentif yang relatif kecil, kemudian SDM yang mampu mengelola juga tidak ada. Belum lagi permodalan dan infrastruktur yang terbatas.

Pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang bisa dibilang pertama kali dalam sejarah. Pemerintah secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Mentan No. 1117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kepmentan No. 800 Tahun 2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi. Untuk pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800/kg, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840/kg, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640/kg, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360/kg, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640/kg.

Keputusan pemerintah tersebut ternyata tak langsung disikapi kalangan kios pengecer. Gejolak pun terjadi, saat petani memasuki musim tanam Oktober, masih ada kios yang menjual pupuk subsidi di atas HET. Data Kementerian Pertanian, rata-rata selisih harga di tingkat kios mencapai Rp20.800 per sak Urea dan Rp20.950 per sak NPK.

Data yang dihimpun Kementerian Pertanian, dari total 27.319 kios pupuk di Indonesia, terdapat 2.039 kios yang terbukti menjual di atas HET. Kios-kios tersebut tersebar di 285 kabupaten/kota pada 28 provinsi, dengan konsentrasi pelanggaran tertinggi di wilayah padat aktivitas pertanian seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah akan menindak 2.039 kios pupuk, termasuk pencabutan ijin yang terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas HET. Namun persoalan tidak berhenti, menurut Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), pencabutan ijin kios pengecer ternyata menimbulkan imbas petani malah kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Jadi PR bagi pemerintah.

Tim Sinta

Catatan Pangan 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis perkiraan produksi padi/beras tahun 2025. Rilis disampaikan 3 November lalu. Menurut BPS, produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, naik 13,54% dibandingkan tahun lalu.

Meskipun produksi Oktober-Desember 2025 masih potensi, kenaikan dua digit ini termasuk prestasi luar biasa. Amat jarang produksi beras bisa naik lebih 5%. Karena itu, apresiasi perlu diberikan kepada Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan seluruh jajarannya.

Capaian ini membuat tekad pemerintah bahwa tidak akan menugaskan Bulog mengimpor beras yang diputuskan pada akhir tahun lalu bisa dipenuhi. Capaian ini cukup membanggakan, termasuk bagi Presiden Prabowo Subianto. Namun, yang patut diingat, tidak menugaskan Bulog mengimpor beras bukan berarti Indonesia tidak impor beras. Impor beras khusus oleh swasta tetap berlangsung. Tidak ada larangan untuk itu.

Capaian Positif

Kenaikan produksi beras tahun ini setidaknya bisa dijelaskan melalui tiga hal. Pertama, *low base effect*. Produksi beras tahun 2024 adalah terendah sejak 2018. Ketika posisi awal pertumbuhan rendah, secara persentase kenaikan akan tinggi. Yang istimewa, kenaikan tinggi kali ini bukan hanya dari sisi persentase, tetapi juga dalam tingkat produksi yang telah melampaui 2018: 33,94 juta ton beras.

Kedua, seluruh sumber daya (terutama anggaran dan SDM) Kementerian Pertanian (Kementan) tahun ini difokuskan pada beras dan jagung. Dalam konteks ini termasuk penambahan volume pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dengan mekanisme penyaluran yang sederhana. Ini memungkinkan petani mengakses pupuk bersubsidi lebih mudah.

Ketiga, berkah alam. Sepanjang tahun ini hujan tiada putus. Termasuk di sentra-sentra wilayah produksi padi. Wilayah yang biasanya tak bisa diusahakan, misal sawah tadah hujan, bisa ditanami. Luas panen pun naik tinggi: 1,3 juta ha (12,98%). Karena kombinasi dua faktor itu, kalau produksi tidak naik ya amit-amit.

Kebutuhan konsumsi tahun ini diperkirakan 30,9 juta ton. Produksi dikurangi konsumsi ada surplus beras 3,87 juta ton. Ini surplus tahunan tertinggi sejak 2019. Hanya kalah dari 2018: 4,37 juta ton beras. Namun demikian, ada catatan penting dari angka-angka produksi padi/beras 2025 ini. Pertama, kenaikan produksi disumbang oleh penambahan luas panen: dari 10,05 juta ha pada 2024 menjadi 11,36 juta ha di 2025.

Kedua, produktivitas mencapai 5,31 ton gabah kering giling (GKG) per ha. Memang naik dari produktivitas tahun 2024 (5,28 ton GKG per ha), tetapi kenaikannya hanya 0,45%. Periode 2018-2024 produktivitas hanya naik minor: 0,13%. Inilah PR yang relatif belum tersentuh sampai saat ini. Meningkatkan produktivitas perlu lompatan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi. Tanpa keduanya produktivitas sulit digenjot.

Di Asia Tenggara, pada 2022 produktivitas padi Indonesia menempati posisi empat setelah China, Jepang, dan Vietnam. Selisih produktivitas Indonesia dan China mencapai 1,84 ton/ha dan dengan Vietnam 0,78 ton/ha. Meningkatkan produksi dengan menambah luas panen bisa ditempuh dengan menaikkan indeks pertanaman dan mencetak sawah baru. Tapi kedua langkah ini tidak mudah. Indeks pertanaman selama bertahun-tahun tak beranjak dari 1,4-1,5. Mencetak sawah baru butuh anggaran besar dan waktu.

Ketiga, perkiraan produksi beras 34,77 juta ton belum memperhitungkan dampak kebijakan penyerapan gabah semua kualitas tahun ini. Rendemen penyerapan gabah semua kualitas oleh Bulog mencapai 50,8%, lebih rendah dari standar BPS untuk menghitung produksi beras saat ini: 53,38%. Ada selisih 2,58%. Kalau rendemen gabah ketika diolah jadi beras sebesar 50,8% ini terjadi secara nasional, angka 2,58% itu setara 897.000 ton beras. Ini harus menjadi faktor pengurang produksi 34,77 juta ton.

Catatan Negatif

Secara keseluruhan, meskipun produksi padi/beras tahun ini diperkirakan naik tinggi, akan tetapi capaian itu dibarengi beberapa catatan negatif. Pertama, akibat kebijakan penyerapan gabah semua kualitas oleh Bulog, rendemen pengolahan tidak pasti. Dengan rerata rendemen hanya 50,8%, ujungnya membuat harga beras pengadaan Bulog jadi mahal: Rp14.404/kg. Ini akan memengaruhi harga pokok beras (HPB) Bulog yang harus dibayar pemerintah. HPB Bulog diperkirakan mencapai Rp19.343/kg.

Kedua, ditemukan beras tidak memenuhi standar yang merupakan hasil giling dari penyerapan gabah semua kualitas, kendala cuaca, dan kadar air tidak homogen. Rapat koordinasi terbatas Kementerian Koodinator Pangan, 1 September 2025, menyetujui penjualan beras tidak standar itu sebanyak 21.300 ton seharga Rp11.500/kg. Belum tahu sudah terjual atau belum.

Ketiga, harga beras tetap tinggi. Memang ada kecenderungan harga beras mulai turun. Merujuk panel harga Badan Pangan Nasional 23 November 2025, rerata harga beras



premium masih di atas harga eceran tertinggi (HET) di semua zona: I, II, dan III. Sementara rerata harga beras medium sudah di atas HET di semua zona.

Di tengah aliran beras operasi pasar SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) oleh Bulog yang masih rendah sampai saat ini, harga beras medium yang turun diperkirakan karena keberadaan Satgas Pengendalian Harga Beras. Satgas ini dibentuk pada 20 Oktober 2025 melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 375 Tahun 2025. Satgas dibentuk tak lama setelah Mentan Amran mendapat tambahan amanah baru: Kepala Bapanas.

Jika perkiraan ini benar, pemerintah harus hati-hati untuk menjadikan penurunan harga itu sebagai dasar membuat kebijakan. Satgas Pengendalian Harga Beras pada dasarnya adalah bentuk ketidakpercayaan pemerintah kepada pasar dan pelaku usaha. Karena itu, kebijakan yang ditempuh tidak melalui mekanisme pasar, tapi memakai pendekatan keamanan dengan menjadikan Satgas Pangan Polri sebagai tangan kanan.

Satgas akan mengidentifikasi usaha dan pemeriksaan harga mulai dari produsen, distributor, toko besar, hingga retail modern. Jika sesuai HET, distempel patuh. Jika melebihi HET, diberikan surat teguran tertulis dengan penyesuaian waktu selama seminggu. Penggunaan pendekatan hukum untuk menstabilkan harga beras dengan mendorong Satgas Pangan mengawasi stok, distribusi, dan harga beras telah menciptakan ketidakpastian usaha.

Keterlibatan aparat keamanan dalam stabilisasi harga tidak lagi mampu menggambarkan sinyal buat pelaku usaha. Kemudian muncul sinyal palsu. Kalau sinyal palsu ini dijadikan dasar membuat kebijakan, kebijakan bisa salah.



Khudori *(Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO)*

KALENDER 2026

JANUARI 2026

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
29	29	30	31	1 12 PON 12	2 13 WAGE 13	3 14 KLIWON 14
4 15 LEGI 15	5 16 PAHING 16	6 17 PON 17	7 18 WAGE 18	8 19 KLIWON 19	9 20 LEGI 20	10 21 PAHING 21
11 22 PON 22	12 23 WAGE 23	13 24 KLIWON 24	14 25 LEGI 25	15 26 PAHING 26	16 27 PON 27	17 28 WAGE 28
18 29 KLIWON 29	19 30 LEGI 30	20 1 PAHING 1	21 2 PON 2	22 3 WAGE 3	23 4 KLIWON 4	24 5 LEGI 5
25 6 PAHING 6	26 7 PON 7	27 8 WAGE 8	28 9 KLIWON 9	29 10 LEGI 10	30 11 PAHING 11	31 12 PON 12

1 Januari : Tahun Baru Masehi 2026
16 Januari : Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

FEBRUARI 2026

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
1 13 WAGE 13	2 14 KLIWON 14	3 15 LEGI 15	4 16 PAHING 16	5 17 PON 17	6 18 WAGE 18	7 19 KLIWON 19
8 20 LEGI 20	9 21 PAHING 21	10 22 PON 22	11 23 WAGE 23	12 24 KLIWON 24	13 25 LEGI 25	14 26 PAHING 26
15 27 PON 27	16 28 WAGE 28	17 29 KLIWON 29	18 1 LEGI 30	19 2 PAHING 1	20 3 PON 2	21 4 WAGE 3
22 5 KLIWON 4	23 6 LEGI 5	24 7 PAHING 6	25 8 PON 7	26 9 WAGE 8	27 10 KLIWON 9	28 11 LEGI 10
1	2	3	4	5	6	7

16 Februari : Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
17 Februari : Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

MEI 2026

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
26	27	28	29	30	1 14 PON 13	2 15 WAGE 14
3 16 KLIWON 15	4 17 LEGI 16	5 18 PAHING 17	6 19 PON 18	7 20 WAGE 19	8 21 KLIWON 20	9 22 LEGI 21
10 23 PAHING 22	11 24 PON 23	12 25 WAGE 24	13 26 KLIWON 25	14 27 LEGI 26	15 28 PAHING 27	16 29 PON 28
17 30 WAGE 29	18 1 KLIWON 1	19 2 LEGI 2	20 3 PAHING 3	21 4 PON 4	22 5 WAGE 5	23 6 KLIWON 6
24 7 LEGI 7	25 8 PAHING 8	26 9 PON 9	27 10 WAGE 10	28 11 KLIWON 11	29 12 LEGI 12	30 13 PAHING 13
31 14 PON 14	1	2	3	4	5	6

1 Mei : Hari Buruh Internasional
14 Mei : Kenaikan Yesus Kristus
15 Mei : Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus
27 Mei : Idul Adha 1447 H
28 Mei : Cuti Bersama Idul Adha 1447 H
31 Mei : Hari Raya Waisak

JUNI 2026

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
31	1 15 WAGE 15	2 16 KLIWON 16	3 17 LEGI 17	4 18 PAHING 18	5 19 PON 19	6 20 WAGE 20
7 21 KLIWON 21	8 22 LEGI 22	9 23 PAHING 23	10 24 PON 24	11 25 WAGE 25	12 26 KLIWON 26	13 27 LEGI 27
14 28 PAHING 28	15 29 PON 29	16 30 WAGE 1	17 1 KLIWON 2	18 2 LEGI 3	19 3 PAHING 4	20 4 PON 5
21 5 WAGE 6	22 6 KLIWON 7	23 7 LEGI 8	24 8 PAHING 9	25 9 PON 10	26 10 WAGE 11	27 11 KLIWON 12
28 12 LEGI 13	29 13 PAHING 14	30 14 PON 15	1	2	3	4

1 Juni : Hari Lahir Pancasila
16 Juni : 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 H

SEPTEMBER 2026

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
30	31	1 18 LEGI 19	2 19 PAHING 20	3 20 PON 21	4 21 WAGE 22	5 22 KLIWON 23
6 23 LEGI 24	7 24 PAHING 25	8 25 PON 26	9 26 WAGE 27	10 27 KLIWON 28	11 28 LEGI 29	12 29 PAHING 30
13 30 PON 1	14 1 WAGE 2	15 2 KLIWON 3	16 3 LEGI 4	17 4 PAHING 5	18 5 PON 6	19 6 WAGE 7
20 7 KLIWON 8	21 8 LEGI 9	22 9 PAHING 10	23 10 PON 11	24 11 WAGE 12	25 12 KLIWON 13	26 13 LEGI 14
27 14 PAHING 15	28 15 PON 16	29 16 WAGE 17	30 17 KLIWON 18	1	2	3

OKTOBER 2026

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
28	29	30	31	1 18 LEGI 19	2 19 PAHING 20	3 20 PON 21
4 21 WAGE 22	5 22 KLIWON 23	6 23 LEGI 24	7 24 PAHING 25	8 25 PON 26	9 26 WAGE 27	10 27 KLIWON 28
11 28 LEGI 29	12 29 PAHING 1	13 1 PON 2	14 2 WAGE 3	15 3 KLIWON 4	16 4 LEGI 5	17 5 PAHING 6
18 6 PON 7	19 7 WAGE 8	20 8 KLIWON 9	21 9 LEGI 10	22 10 PAHING 11	23 11 PON 12	24 12 WAGE 13
25 13 KLIWON 14	26 14 LEGI 15	27 15 PAHING 16	28 16 PON 17	29 17 WAGE 18	30 18 KLIWON 19	31 19 LEGI 20

TABLOID Sinar Tani
TABLOID SINARTANI.COM
SINTA TV

MARET 2026

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
1 12 PAHING 11	2 13 PON 12	3 14 WAGE 13	4 15 KLIWON 14	5 16 LEGI 15	6 17 PAHING 16	7 18 PON 17
8 19 WAGE 18	9 20 KLIWON 19	10 21 LEGI 20	11 22 PAHING 21	12 23 PON 22	13 24 WAGE 23	14 25 KLIWON 24
15 26 LEGI 25	16 27 PAHING 26	17 28 PON 27	18 29 WAGE 28	19 30 KLIWON 29	20 1 LEGI 30	21 2 PAHING 1
22 3 PON 2	23 4 WAGE 3	24 5 KLIWON 4	25 6 LEGI 5	26 7 PAHING 6	27 8 PON 7	28 9 WAGE 8
29 10 KLIWON 9	30 11 LEGI 10	31 12 PAHING 11	1	2	3	4

18 Maret : Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 1948
19 Maret : Hari Suci Nyepi 1948
20 Maret : Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H
21-22 Maret : Hari Raya Idul Fitri 1447 H
23-24 Maret : Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H

APRIL 2026

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
29	30	31	1 13 PON 12	2 14 WAGE 13	3 15 KLIWON 14	4 16 LEGI 15
5 17 PAHING 16	6 18 PON 17	7 19 WAGE 18	8 20 KLIWON 19	9 21 LEGI 20	10 22 PAHING 21	11 23 PON 22
12 24 WAGE 23	13 25 KLIWON 24	14 26 LEGI 25	15 27 PAHING 26	16 28 PON 27	17 29 WAGE 28	18 1 KLIWON 29
19 2 LEGI 1	20 3 PAHING 2	21 4 PON 3	22 5 WAGE 4	23 6 KLIWON 5	24 7 LEGI 6	25 8 PAHING 7
26 9 PON 8	27 10 WAGE 9	28 11 KLIWON 10	29 12 LEGI 11	30 13 PAHING 12	1	2

3 April : Wafat Yesus Kristus
5 April : Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

JULI 2026

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
28	29	30	1 15 WAGE 16	2 16 KLIWON 17	3 17 LEGI 18	4 18 PAHING 19
5 19 PON 20	6 20 WAGE 21	7 21 KLIWON 22	8 22 LEGI 23	9 23 PAHING 24	10 24 PON 25	11 25 WAGE 26
12 26 KLIWON 27	13 27 LEGI 28	14 28 PAHING 29	15 29 PON 30	16 30 WAGE 1	17 1 KLIWON 2	18 2 LEGI 3
19 3 PAHING 4	20 4 PON 5	21 5 WAGE 6	22 6 KLIWON 7	23 7 LEGI 8	24 8 PAHING 9	25 9 PON 10
26 10 WAGE 11	27 11 KLIWON 12	28 12 LEGI 13	29 13 PAHING 14	30 14 PON 15	31 15 WAGE 16	1

AGUSTUS 2026

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
26	27	28	29	30	31	1 16 KLIWON 17
2 17 LEGI 18	3 18 PAHING 19	4 19 PON 20	5 20 WAGE 21	6 21 KLIWON 22	7 22 LEGI 23	8 23 PAHING 24
9 24 PON 25	10 25 WAGE 26	11 26 KLIWON 27	12 27 LEGI 28	13 28 PAHING 29	14 29 PON 1	15 1 WAGE 2
16 2 KLIWON 3	17 3 LEGI 4	18 4 PAHING 5	19 5 PON 6	20 6 WAGE 7	21 7 KLIWON 8	22 8 LEGI 9
23 9 PAHING 10	24 10 PON 11	25 11 WAGE 12	26 12 KLIWON 13	27 13 LEGI 14	28 14 PAHING 15	29 15 PON 16
30 16 WAGE 17	31 17 KLIWON 18	1	2	3	4	5

17 Agustus : Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81
25 Agustus : Maulid Nabi Muhammad SAW

NOVEMBER 2026

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
1 20 PAHING 21	2 21 PON 22	3 22 WAGE 23	4 23 KLIWON 24	5 24 LEGI 25	6 25 PAHING 26	7 26 PON 27
8 27 WAGE 28	9 28 KLIWON 29	10 29 LEGI 30	11 30 PAHING 1	12 1 PON 2	13 2 WAGE 3	14 3 KLIWON 4
15 4 LEGI 5	16 5 PAHING 6	17 6 PON 7	18 7 WAGE 8	19 8 KLIWON 9	20 9 LEGI 10	21 10 PAHING 11
22 11 PON 12	23 12 WAGE 13	24 13 KLIWON 14	25 14 LEGI 15	26 15 PAHING 16	27 16 PON 17	28 17 WAGE 18
29 18 KLIWON 19	30 19 LEGI 20	1	2	3	4	5

DESEMBER 2026

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
29	30	1 20 PAHING 21	2 21 PON 22	3 22 WAGE 23	4 23 KLIWON 24	5 24 LEGI 25
6 25 PAHING 26	7 26 PON 27	8 27 WAGE 28	9 28 KLIWON 29	10 29 LEGI 1	11 1 PAHING 2	12 2 PON 3
13 3 WAGE 4	14 4 KLIWON 5	15 5 LEGI 6	16 6 PAHING 7	17 7 PON 8	18 8 WAGE 9	19 9 KLIWON 10
20 10 LEGI 11	21 11 PAHING 12	22 12 PON 13	23 13 WAGE 14	24 14 KLIWON 15	25 15 LEGI 16	26 16 PAHING 17
27 17 PON 18	28 18 WAGE 19	29 19 KLIWON 20	30 20 LEGI 21	31 21 PAHING 22	1	2

24 Desember : Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus (Natal)
25 Desember : Kelahiran Yesus Kristus (Natal)



Sudaryono:

6,5 Tahun Kuliah di IPB, Sulit dan Jelimet

Setelah menempuh kuliah doktor selama 6,5 tahun, akhirnya Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menuntaskan kuliahnya di IPB University. Satu kalimat mengisahkan perjalanan panjang panjang menempuh doktor. Kampusnya sulit, jelimet, penuh tekanan, tapi justru itu yang membuatnya bangga bisa bertahan hingga tuntas.

Perjalanan panjang yang tak banyak orang lihat dari dekat menandakan sebuah proses yang jauh dari kata instan, meski sebagai seorang pejabat pemerintah, bahkan dikatakan dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Di balik gelar itu, ada tekanan, kelelahan, dan godaan menyerah yang datang berkali-kali.

Masuk Sekolah Bisnis IPB pada Juli 2019 atas rekomendasi Prof. Rachmat Pambudy, Sudaryono mengaku awalnya hanya ingin belajar. Namun sejak awal, ia langsung berhadapan dengan karakter IPB yang menurutnya berbeda. “Kesan saya terhadap IPB itu satu kata jelimet. Detail, teliti, kritis, dan sulit,” ujarnya.

Kalimat itu bukan sekadar kesan sesaat. Di tengah padatnya tugas negara dan dinamika politik yang menyita energi, perkuliahan doktoral di IPB menjadi tantangan tersendiri. Sudaryono bahkan mengakui, di satu titik ia sempat hampir menyerah. “Saya pernah bilang, saya sempat mau menyerah. Waktu kampanye di Jawa Tengah, sempat terpikir pindah kampus,” katanya terus terang.

Namun niat itu tak pernah benar-benar diwujudkan. Ada dorongan untuk bertahan, sekalipun jalannya terasa berat. Sudaryono mengaitkan pengalamannya di IPB dengan satu pesan yang selalu ia pegang dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman. “Kalau kita ingin jadi berlian, kita harus siap ditekan. Kalau tidak pernah ditekan, kita jadi lumpur yang tidak ada gunanya,” ucapnya.

IPB, baginya, adalah tekanan itu. Sulit di awal, menyakitkan di tengah, tapi membentuk di akhir. Ia menyebut, menghadapi kampus yang sulit memang menghadirkan penderitaan. Namun di balik penderitaan itu, ada kepuasan yang lebih tinggi. “Karena kita pernah menderita yang lebih berat dibandingkan kampus lain,” katanya.

Menariknya, Sudaryono justru berharap IPB tidak berubah. Menurutnya, kesulitan yang ada saat ini adalah kekuatan. “Saya tidak berharap yang sulit jadi mudah. Saya berharap IPB tetap seperti ini, tetap dengan kesulitannya, dengan kejelimetannya,” ujarnya.

Pandangan itu datang dari sosok dengan latar pendidikan internasional. Sudaryono menamatkan S1 di National Defense Academy of Japan pada 2009 dan melanjutkan S2 (MBA) di Universitas Swiss German. Meski pernah ditempa di lingkungan akademik luar negeri, ia menilai IPB tetap memberi tantangan yang khas dan mendewasakan.

Selain soal kampus, Sudaryono juga menyinggung para lulusan IPB yang banyak mengisi posisi strategis di Kementerian Pertanian. Ia melihat satu kesamaan yang kuat. “Orangnya pintar-pintar, ilmunya kuat, tapi kurang pamer,” katanya sambil tersenyum.

Menurutnya, sikap humble memang nilai yang luar biasa. Namun di era sekarang, hal itu juga bisa menjadi tantangan. “Jangan sampai yang pintar, yang benar, yang sesuai sains, justru kalah dengan opini-opini yang dasar keilmuannya tidak terlalu kuat, hanya karena dia pintar bicara,” tutur Sudaryono.

Ia menilai IPB dan para alumninya punya tanggung jawab moral untuk lebih berani tampil ke ruang publik. Bukan untuk gagah-gagahan, melainkan untuk memastikan sains dan data tetap menjadi rujukan. “Ilmunya sudah tinggi, tinggal keberanian untuk menunjukkan ke luar,” ujarnya.

Holdingisasi BUMN

Saat sidang terbuka doktor, Sudaryono blak-blakan menyebut holdingisasi BUMN sebagai kebijakan yang tepat berdasarkan riset disertasinya. Bukan opini, bukan juga sekadar kesan pribadi.

Ia menegaskan, kesimpulan itu lahir dari riset akademik yang ia pertahankan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di School of Business IPB University, Bogor, Senin (15/12). Disertasi Sudaryono berjudul Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia

Dalam sidang terbuka itu, Sudaryono diuji langsung dua menteri, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Sejumlah pejabat negara turut hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, serta Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.



Sudaryono menilai, baik holdingisasi BUMN maupun pembentukan super holding melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia merupakan keputusan strategis yang sudah berada di jalur benar. Apalagi kebijakan tersebut diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun ia juga tak menutup mata. Di balik kata “tepat”, ada dua catatan tebal yang harus benar-benar diperhatikan agar kebijakan ini tidak sekadar rapi di atas kertas.

Catatan pertama datang dari dapur internal perusahaan. Rasio likuiditas dan pengelolaan utang menjadi kunci. *Current ratio, debt to equity ratio*, hingga tata kelola pembiayaan harus dicermati dengan teliti. Kalau lengah sedikit saja, beban utang bisa jadi batu di leher.

Catatan kedua soal penyelarasan pascaholdingisasi. Menyatukan banyak perusahaan ke dalam satu payung bukan perkara instan. Ada budaya kerja, sistem, hingga kepentingan yang harus dirapikan. Menurut Sudaryono, semakin cepat penyelarasan dilakukan, semakin baik dampaknya bagi kinerja. “Kalau terlalu lama nggak selaras, itu berbiaya. Dan biaya itu menggerus keuntungan perusahaan,” katanya.

Menjawab anggapan bahwa holdingisasi BUMN dilakukan terlambat, Sudaryono memilih tersenyum. Baginya, debat soal waktu sudah tak relevan. Yang penting, langkah itu akhirnya diambil. “Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” ujarnya singkat, tapi menohok.

Bagi Sudaryono, IPB adalah kampus yang bekerja dalam diam. Tidak banyak bicara, tapi menghasilkan banyak hal. Setelah 6,5 tahun bergulat dengan tekanan akademik, ia mengaku bangga pernah menjadi bagian dari proses itu. “Sulit, jelimet, tapi justru di situlah kebanggaannya,” katanya. **Gesh/Yul**

Petani dan Penyuluh,
Penopang Swasembada Pangan Nasional



Oleh : **Iskandar Pasha,S.P**
Penyuluh Ahli Pertama
Kab, Merangin Jambi

Pangan merupakan kebutuhan dasar sekaligus pilar utama ketahanan dan kedaulatan bangsa. Lebih dari 275 juta penduduk Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

Konsumsi beras nasional yang masih berada pada kisaran 96–98 kilogram per kapita per tahun menjadikan sektor pangan, khususnya beras, sebagai komoditas strategis yang harus dijaga keberlanjutannya dari sisi produksi, distribusi, hingga cadangan nasional.

Pemerintah terus mendorong swasembada pangan melalui penguatan produksi dalam negeri, salah satunya dengan menjaga luas baku sawah nasional di kisaran 7,4 juta hektare serta meningkatkan indeks pertanaman.

Di balik angka produksi beras nasional yang mampu dipertahankan pada kisaran 30–31 juta ton beras dan produksi jagung lebih dari 15 juta ton pipilan kering, terdapat kerja keras petani yang tidak pernah berhenti mengolah lahan, serta peran penyuluh yang memastikan teknologi, sarana produksi, dan inovasi dapat diterapkan secara tepat di tingkat usaha tani.

Memasuki tahun 2025, capaian sektor pangan nasional juga tidak lepas dari penguatan sistem pendampingan penyuluhan. Penyuluh pertanian menjadi ujung tombak dalam mengawal penyaluran pupuk bersubsidi, penggunaan benih unggul, penerapan pengendalian organisme pengganggu tanaman, hingga adaptasi pola tanam terhadap perubahan iklim.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan sangat ditentukan oleh sinergi petani dan penyuluh. “Petani adalah pahlawan pangan, dan penyuluh adalah penggeraknya. Tanpa keduanya, kebijakan tidak akan sampai ke sawah,” tegasnya.

Selain penguatan produksi, pemerintah juga menjaga stabilitas melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah yang pada 2025 dijaga di atas 1,5 juta ton beras. Cadangan ini menjadi bantalan strategis ketika terjadi gangguan produksi maupun kondisi darurat. Dalam situasi bencana di sejumlah wilayah Sumatera, kehadiran negara kembali diuji.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, bantuan pangan disalurkan kepada ratusan ribu keluarga terdampak. Di lapangan, penyuluh pertanian turut berperan dalam pendataan, pengawalan distribusi, hingga memastikan bantuan tepat sasaran kepada petani dan masyarakat terdampak.

Menteri Pertanian menegaskan bahwa kebijakan pangan harus berpihak pada pelaku utama dan adaptif terhadap kondisi darurat. “Ketika bencana terjadi, negara harus hadir cepat. Bantuan pangan tidak boleh terlambat, dan stok nasional harus tetap aman,” ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sistem pangan nasional dibangun tidak hanya untuk kondisi normal, tetapi juga untuk menghadapi krisis.

Pada akhirnya, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional merupakan hasil kerja kolektif yang berangkat dari bawah. Kerja keras petani di lahan, pendampingan penyuluh di lapangan, serta dukungan kebijakan yang konsisten menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan sinergi yang terus diperkuat, Indonesia optimistis mampu mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, sekaligus memastikan pangan tetap tersedia bagi seluruh rakyat, dalam kondisi apa pun.

Kolom

Pembukaan Hutan Semena-mena:
Menggerus Pertanian, Merusak Tata Air, Mengancam Kesejahteraan



Oleh: **Memed Gunawan**

Akhir tahun 2025 adalah masa berkabung akibat bencana alam di berbagai belahan dunia. Banjir besar dan longsor di Sumatera pada November-Desember 2025, Cyclon Tropis di India dan Sri Lanka, banjir di Vietnam Utara, di Jawa Tengah menyisakan kepedihan mendalam. Perusakan ekosistem hutan menjadi penyebab parahnya dampak terhadap kehidupan manusia.

Deforestasi netto Indonesia 2024 mencapai **175 ribu ha/tahun** (KLHK).dan kehilangan hutan sejak awal 2000-an tercatat **jutaan hektare**, terutama di Sumatra dan Kalimantan. Banjir dan longsor membentuk sedimentasi irigasi & waduk menyebabkan menurunnya ketersediaan air pertanian dan erosi tanah yang menghancurkan lahan pertanian.

Produktivitas jangka panjang menurun. Banjir hebat dan tanah longsor di pulau Sumatra pada akhir 2025 memerlukan biaya pemulihan mencapai 55 triliun rupian, itu pun tidak bisa mengembalikan ekosistem ke kondisi aslinya.

Hutan adalah fondasi ekologis bagi pertanian, tata air, dan kehidupan manusia. Namun pembukaan hutan secara semena-mena masih terjadi dan kerap dibenarkan atas nama pembangunan dan investasi. Perusakan hutan bukanlah dosa masyarakat peladang berpindah yang menggunakan alat sederhana dengan tangannya, tetapi mereka yang menggaruk lahan dengan lahap dengan alat berat. Dampaknya justru berlawanan dengan tujuan pembangunan itu sendiri karena menurunkan produktivitas pertanian, meningkatkan risiko bencana, dan memperburuk kesejahteraan masyarakat.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa **deforestasi netto Indonesia pada 2024 masih sekitar 175 ribu hektare per tahun**, meskipun lebih rendah dibanding satu dekade lalu. Angka ini tetap signifikan, karena terjadi di wilayah-wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) yang berfungsi vital bagi pertanian dan pasokan air. Sejak awal 2000-an, Indonesia telah kehilangan **jutaan hektare hutan alam**, terutama akibat ekspansi perkebunan, pertam-bangan, dan pembukaan lahan yang tidak terkendali.

Bagi sektor pertanian, hutan bukanlah penghalang, melainkan penyangga utama. Akar pepohonan menjaga struktur tanah, meningkat-kan kemampuan tanah menyerap air, dan menahan erosi. Ketika hutan dibuka, lapisan tanah atas yang subur mudah hanyut. Dampaknya terasa hingga ke hilir: saluran irigasi dangkal oleh sedimen, sawah lebih sering kebanjiran, dan produktivitas menurun.

Hutan berfungsi sebagai “menara air” yang menyimpan air hujan. Kita bangun banyak waduk dan bendungan untuk menampung air tapi akibat banjir dan longsor waduk mengalami sedimentasi dan negara kemudian harus mengeluarkan biaya besar untuk normalisasi sungai dan perbaikan irigasi.

Siapa yang diuntungkan? **Keuntungan ekonomi jangka pendek dinikmati oleh segelintir pelaku usaha**, sementara kerugian ekologis dan sosial ditanggung masyarakat luas. Petani kecil, masyarakat adat, dan generasi mendatang membayar harga mahal berupa lingkungan yang rusak dan sumber daya alam yang menipis.

Pembukaan hutan tanpa kendali bukanlah solusi pembangunan, melainkan sumber masalah baru. Menjaga hutan berarti menjaga pertanian, menjaga tata air, dan menjaga kehidupan itu sendiri.

Selamat Datang Penyuluh Pertanian Daerah

Mulai 1 Januari 2026, ribuan penyuluh pertanian ditarik ke pusat melalui Inpres No. 3 Tahun 2025. Kebijakan ini menjadi sebuah langkah berani pemerintah untuk memperkuat komando dan mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Bukan sekadar rotasi administrasi, keputusan ini mejadi upaya penataan ulang kekuatan di garis terdepan pertanian Indonesia.



Dr. Idha Widi Arsanti, SP, MP
Kepala Badan PPSDMP Kementan

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI, Dr. Idha Widi Arsanti, SP, MP, menegaskan, profesi penyuluh pertanian merupakan panggilan jiwa yang memegang peran strategis dalam mewujudkan agenda besar pemerintah, terutama percepatan swasembada pangan.

Saat ini menurutnya, Indonesia memiliki sekitar 39 ribu penyuluh pertanian ASN yang selama ini tersebar di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kawasan 3T. Pemerintah menilai kekuatan sebesar itu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. “Kita ingin satu langkah, satu arah. Karena mandat Presiden Prabowo sangat jelas: swasembada pangan harus dipercepat,” ujarnya dalam podcas dengan SINTATV, beberapa waktu lalu.

Santi mengakui pertanian Indonesia tengah menghadapi tantangan besar, mulai dari alih fungsi lahan, penurunan luas kepemilikan lahan, hingga produktivitas yang belum optimal. Apalagi target swasembada pangan yang semula direncanakan empat tahun, kini hanya diberi waktu satu tahun.

Karena itu, strategi percepatan harus melibatkan seluruh unsur. Tak terkecuali penyuluh pertanian sebagai pendamping utama petani. Dalam situasi seperti ini, Santi menilai, kehadiran penyuluh semakin penting dan memiliki peran yang tidak tergantikan.

Mereka adalah jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil di lapangan. Tanpa pendampingan, inovasi pertanian tidak akan diadopsi dengan cepat dan efisien. “Penyuluh adalah ujung tombak. Tanpa mereka, program pertanian modern akan berjalan lambat. Bahkan, regenerasi petani bisa terhambat,” katanya.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 menjadi dasar kebijakan penarikan penyuluh ke pusat. Pemerintah telah melakukan pembahasan intensif sejak akhir 2024, melibatkan Kementerian PAN-RB, BKN, Kementerian Keuangan, hingga DPR.

”Setelah Inpres terbit pada Februari 2025, kami bergerak cepat melakukan sosialisasi luas, termasuk melalui apel pagi penyuluh nasional yang kini dilakukan setiap hari,” katanya. Bukan hanya itu BPPSDMP juga membuka ruang komunikasi seluas mungkin, termasuk penyuluh di 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal) pun harus mendapatkan informasi yang sama.

Perkuat Kelembagaan di Daerah

Salah satu poin penting dalam Inpres tersebut adalah penguatan kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Meski penyuluh menjadi pegawai pusat, tempat kerja mereka tetap berada di daerah. Bahkan, pemerintah daerah dilarang mengalihfungsikan BPP agar fasilitas ini tetap menjadi rumah belajar bagi petani.

Menurut Santi, di BPP terdapat ruang penyuluh, sarana pertemuan, serta lahan demplot untuk menunjukkan teknologi baru. “BPP bukan sekadar bangunan. Itu adalah pusat pembelajaran dan inovasi bagi petani. Karena itu, keberadaannya harus dijaga,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perbedaan kompetensi penyuluh di berbagai daerah. Pemerintah pusat, katanya, telah menyiapkan pelatihan dasar teknis yang akan dimulai pada 2026 guna menyamakan kapasitas. Pelatihan tersebut mencakup metode penyuluhan, teknik komunikasi, strategi mendorong adopsi inovasi, hingga pemahaman manajemen usaha tani modern.

“Menjadi penyuluh tidak cukup hanya dengan pengalaman. Ada seni mengajar orang dewasa, ada teknik komunikasi, dan ada pendekatan kelembagaan. Kompetensi itu harus diperkuat,” jelasnya.

Kekhawatiran mengenai pendapatan penyuluh daerah setelah beralih status juga menjadi perhatian Kementerian Pertanian. Santi menegaskan, Inpres secara tegas melarang adanya penurunan pendapatan. Jika ada penyuluh yang berpotensi kehilangan tunjangan daerah karena beralih ke pusat, maka mereka tidak akan dipaksa pindah. “Ini mandat, tapi bukan paksaan. Kami tidak ingin ada yang dirugikan,” ucapnya.

Ia bercerita bahwa meski beberapa penyuluh khawatir dengan tunjangan, banyak pula yang tetap memilih bergabung ke pusat. “Bagi mereka, menjadi penyuluh adalah panggilan jiwa. Mereka ingin tetap berada di garis terdepan mendampingi petani,” tambahnya.

Kementerian Pertanian berkomitmen memastikan proses peralihan berjalan kondusif dan transparan. Setelah proses alih status selesai, fokus berikutnya adalah penambahan jumlah penyuluh yang saat ini masih jauh dari kebutuhan.

Dengan lebih dari 80 ribu desa di Indonesia, jumlah penyuluh yang ada masih setengah dari kebutuhan ideal. Pemerintah berencana menambah penyuluh secara bertahap, dengan prioritas putra-putri daerah yang lebih memahami karakter lokal. Selain itu, kementerian juga akan memperkuat kelembagaan penyuluhan dan meningkatkan dukungan operasional.

“Kami di Kementerian Pertanian ingin memberikan yang terbaik bagi penyuluh. Sebaliknya, kami juga sangat berharap penyuluh dapat memperkuat pendampingan kepada petani karena keberhasilan swasembada pangan ada di tangan mereka,” katanya.

Ia menegaskan bahwa BPPSDMP siap menerima kritik, saran, dan aspirasi penyuluh agar proses transisi berjalan mulus. “Kita punya tujuan yang sama: petani sejahtera, pangan kuat, dan Indonesia berdaulat. Semua itu tidak mungkin tercapai tanpa penyuluh pertanian,” ujarnya.

Herman/Yul




TABLOID SinarTani
TABLOID SINARTANI.COM
SINTA TV
TABLOID SINAR TANI MENGUCAPKAN
Selamat Datang
Penyuluh Pertanian
MENJADI
ASN PUSAT
EST. 01 Januari 2026
KEMENTERIAN PERTANIAN R.I.
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
tabloidsinartani.com
tabloidsinartani
tabloidsinartani.com
@sinartaniST
tabloidsinartani
SINTA TV

Minum Kopi Nikmat, **Ketahui Batas Aman**



Bagi beberapa orang, kafein dari secangkir kopi di pagi hari menjadi ritual rutin sebagai sumber semangat sepanjang hari. Di balik rasa dan aromanya yang menenangkan, pernahkah terpikir berapa batas aman konsumsi kafein per hari agar tak menjadi mimpi buruk bagi kesehatan?

Kafein sendiri merupakan stimulan alami yang banyak ditemukan dalam kopi, teh, cokelat, dan minuman berenergi. Zat ini dikenal dapat meningkatkan konsentrasi, fokus, energi, serta memperbaiki suasana hati. Namun, di balik manfaatnya, konsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping, seperti peningkatan tekanan darah dan gangguan tidur.

Beberapa orang memang sanggup minum kopi dengan kandungan kafein yang tinggi agar merasa segar sepanjang hari. Namun bagi yang lain, minum kopi setengah cangkir saja mungkin bisa membuat mereka gelisah dan sakit perut. Jika satu cangkir kopi saja bisa menimbulkan efek yang sangat mengganggu, ada baiknya menghindari konsumsi kopi.

Berapa batas konsumsi minum kopi? Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Prof Hardinsyah, menjelaskan batas aman konsumsi kafein bagi orang dewasa adalah sekitar 300–400 miligram per hari. Angka ini setara dengan dua hingga tiga gelas kopi, tergantung ukuran gelasnya.

"Kafein merupakan komponen kimia dalam bahan makanan yang memiliki manfaat, tetapi juga perlu dikonsumsi dengan bijak," ujar Prof Hardinsyah dalam IPB Podcast yang tayang di kanal YouTube IPB TV.

Menurutnya, kafein memiliki karakteristik khusus yang dapat meningkatkan tekanan darah, membuat tubuh tetap terjaga, serta bertindak sebagai antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas. Meski demikian, efeknya bisa berbeda pada setiap individu tergantung sensitivitas tubuh terhadap kafein.

"Bagi orang yang sensitif, satu gelas kopi saja sudah bisa menyebabkan tekanan darah meningkat dan sulit tidur. Tetapi bagi yang tidak sensitif, dua sampai tiga gelas biasanya tidak masalah," jelas Prof Hardinsyah yang juga Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) IPB University ini.

Prof Hardinsyah juga menyoroti dampak kafein terhadap penyerapan zat besi, terutama bagi ibu hamil dan remaja perempuan yang memiliki kebutuhan zat besi tinggi. Ia pun mengingatkan, jika sebelum hamil sudah terbiasa minum kopi, maka sebaiknya saat hamil dikurangi. "Kafein bisa menurunkan penyerapan zat besi dan meningkatkan risiko anemia," ujarnya.

Selain itu, kafein bersifat adiktif yang dapat menyebabkan seseorang merasa kurang bersemangat bila tidak mengonsumsinya. "Kalau sudah terbiasa *ngopi* pagi dan sore, lalu tidak minum, biasanya terasa ada yang hilang. Bahkan sebaliknya, jadi mudah mengantuk," ujarnya sambil tersenyum.

Untuk itu, Ia mengingatkan pentingnya sikap bijak dalam mengonsumsi kafein. Kafein memang bermanfaat bagi sebagian orang untuk meningkatkan semangat dan stamina. Namun, sebaiknya tidak lebih dari empat gelas sehari. "Bagi yang sensitif, perlu waspada karena tekanan darah bisa meningkat mendadak," pesannya.

Mayo Clinic juga mengungkapkan, batas konsumsi kafein yang terbilang aman untuk sebagian besar orang dewasa adalah 400 miligram (mg). Kafein sebanyak ini kira-kira setara dengan 4 cangkir kopi atau 2 gelas minuman berenergi. Meski begitu, ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa minum kopi 4 cangkir per hari tergolong berlebihan.

Secara umum, para ahli merekomendasikan aturan minum kopi yang aman bagi wanita atau pria dewasa adalah tidak lebih dari 2 – 3 cangkir per hari agar terhindar dari efek samping yang tidak diinginkan. Bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui disarankan untuk membatasi minuman berkafein tidak lebih dari 200 miligram per hari atau setara dengan 2 cangkir kopi.

Intinya saat minum kopi pertimbangkan kondisi kesehatan. Baiknya, diskusikan aturan minum kopi dengan dokter terlebih dulu jika memiliki gangguan penyakit yang sangat terkait dengan minum kopi. **Yul**

Cara Aman **Minum Kopi**



1. Minum kopi tanpa gula agar lebih sehat

Sebaiknya hindari minum kopi dengan tambahan pemanis, termasuk krimer. Setiap satu sendok pemanis tambahan dalam kopi bisa menambah jumlah asupan kalori harian. Pemanis atau krimer yang biasanya digunakan untuk kopi mengandung gula atau sirup jagung yang tinggi kandungan fruktosa. Tingginya asupan fruktosa berkaitan dengan risiko beberapa penyakit kronis, termasuk diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Anda akan semakin berisiko jika minum bergelas-gelas kopi manis dalam sehari. Jika ingin mendapatkan manfaat kopi sepenuhnya dan terhindar dari risiko kesehatan, kopi hitam tanpa gula adalah pilihan terbaik.

2. Hindari minum kopi menjelang waktu tidur

Kopis bisa menganggu tidur. Bagi sebagian besar orang, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Rata-rata, efek kafein berlangsung selama 6 jam. Jadi, hindarilah minum kopi di malam hari, maksimal pukul 6 sore, agar tidak mengganggu kualitas tidur. Bila tergoda untuk menyeduh secangkir kopi mendekati waktu tidur, carilah cara lain untuk mengatasi rasa kantuk, seperti berjalan-jalan, melakukan peregangan badan, atau minum air putih.

3. Hindari minum kopi saat perut kosong

Minum kopi di pagi hari ketika perut kosong umumnya tidak menimbulkan masalah bagi sebagian orang. Namun, bagi orang dengan penyakit GERD, minum kopi saat perut kosong bisa menimbulkan gangguan pencernaan, seperti sakit perut, mual, atau *heartburn*., Mengutip Clevelang Clinic, kafein dalam kopi dalam meningkatkan produksi asam lambung dan melemaskan katup lambung sehingga memungkinkan asam naik ke kerongkongan. Jadi, cobalah konsumsi makanan ringan sebelum minum kopi di pagi hari untuk mencegah asam lambung naik.

4. Hindari minum kopi berlebihan

Kafein dalam kopi memiliki efek diuretik yang dapat meningkatkan produksi urine dan menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Jika minum kopi dalam jumlah berlebihan tanpa dibarengi dengan minum air putih yang cukup, bisa berisiko mengalami dehidrasi. Jadi, pastikan untuk tetap minum air putih yang cukup sepanjang hari guna menjaga keseimbangan cairan tubuh.

Kopi pada dasarnya merupakan minuman rendah kalori yang memberikan banyak manfaat. Tapi jika terlalu bergantung dengan konsumsi kopi agar dapat beraktivitas normal, bahkan sampai minum bergelas-gelas setiap harinya, kopi bisa berbahaya untuk tubuh. Jadi perlu menerapkan aturan minum kopi yang tepat agar bisa mendapatkan manfaat minuman ini. Batasi asupannya dan hindari pemakaian gula tambahan agar tetap sehat. **(diolah dari Hellosehat)**

PUNCAK MUSIM HUJAN, Waspadai Busuk Daun Kentang Mengintai



Puncak musim hujan, kentang rentan diserang busuk daun. Daun akan berlesi coklat hingga umbi ikut rusak. Simak langkah pencegahan dan pengendalian efektif agar panen tetap maksimal.

Musim hujan memang menjadi tantangan utama bagi petani kentang, apalagi di saat produksi nasional tengah berupaya meningkat. Data terbaru menunjukkan bahwa produksi kentang di Indonesia mencapai sekitar 1,5 juta ton pada tahun 2022, meningkat sekitar 10,5 persen dibanding tahun sebelumnya.

Ancaman nyata yang bisa muncul dari atas daun hingga ke umbi, yakni penyakit busuk daun. Penyakit ini kerap datang diam-diam, mengikuti ritme hujan yang turun nyaris tiap hari, membuat kebun lembab seperti ruang tunggu bagi patogen.

Patogen Phytophthora infestans menjadi musuh utama. Ia menyerang daun, membentuk bercak-bercak kecil yang cepat melebar, menurunkan kemampuan fotosintesis, lalu merambat hingga ke umbi.

Dampaknya bukan main. Dalam kondisi serangan berat, kehilangan hasil panen kentang bisa mencapai 30–70 persen, terutama di dataran tinggi sentra produksi saat curah hujan tinggi dan suhu berada di kisaran 18–20 derajat Celsius, kondisi favorit patogen berkembang.

Data lapangan menunjukkan, sebagian besar ledakan serangan busuk daun terjadi pada fase pertumbuhan vegetatif hingga awal pembentukan umbi. Daun yang rusak membuat suplai energi ke umbi tersendat, hasil panen mengecil, bentuk tak seragam, bahkan mudah busuk saat penyimpanan.

Bagi petani, ini bukan sekadar soal hasil panen berkurang, tapi juga kualitas yang jatuh, harga jual merosot, dan biaya produksi membengkak akibat pengendalian berulang. Jika tak diantisipasi sejak dini, busuk daun bukan hanya menggerus pendapatan petani, tapi juga berpotensi mengganggu pasokan kentang di pasar.

Karena itu, puncak musim hujan menjadi momen krusial untuk meningkatkan kewaspadaan, memperketat pemantauan kebun, dan menerapkan langkah teknis pengendalian agar ancaman ini tak berubah menjadi gagal panen.

Gejala Serangan dan Pencegahan

Menurut Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura (BRMP Hortikultura), awal serangan ditandai bintik-bintik kecil hijau muda pada daun, yang lambat laun berubah menjadi coklat tua dan kering. Area yang terinfeksi biasanya dikelilingi lingkaran kuning klorotik.

Di cuaca lembab, tepi lesi bisa muncul jamur putih tipis, tanda patogen aktif. Bahkan umbi pun tak luput, dengan butiran coklat muda hingga kemerahan muncul di bawah kulit, menyebar ke dalam jaringan dan menurunkan kualitas serta daya simpan hasil panen.

Sumber penyakit utama berasal dari umbi kentang yang terinfeksi. Spora pada daun yang sakit dapat terbawa angin dan hujan, menyerang daun sehat, atau terbawa air ke mata umbi. Patogen ini berkembang optimal pada suhu 18–20°C, namun bisa hidup antara 10–25°C, sehingga musim hujan dengan kelembaban tinggi menjadi kondisi ideal bagi pertumbuhannya.

Penyebaran cepat ini menuntut petani untuk segera bertindak dengan pencegahan dan pengendalian yang tepat. Pencegahan busuk daun kentang harus dimulai sebelum tanam. Sanitasi lahan menjadi langkah awal dengan membersihkan gulma dan sisa tanaman sebelumnya membantu mengurangi sumber inokulum.

Lahan bersih tak hanya membuat petani lebih nyaman bekerja, tetapi juga meminimalkan tempat patogen berkembang. Pemasangan mulsa, baik organik maupun plastik, membantu mengatur kelembapan dan suhu tanah, mencegah permukaan tanah terlalu basah yang mendukung pertumbuhan spora. Irigasi sprinkle juga efektif, memberi air cukup tanpa membuat tanah tergenang.

Rotasi tanaman menjadi kunci lain. Misalnya, menanam kentang setelah tanaman kubis atau bawang daun memutus siklus hidup Phytophthora infestans. Sebab, patogen ini hanya menyerang tanaman solanaceae.

Pemilihan benih unggul dan tahan penyakit tidak kalah penting. Benih yang direndam dengan agen hayati seperti Trichoderma viride, Pseudomonas fluorescens, atau Streptomyces (10–20 gram per liter air) mampu meningkatkan daya tahan awal tanaman. Varietas tahan penyakit menjadi benteng pertahanan utama, mengurangi risiko serangan meskipun kondisi lingkungan mendukung patogen.

Jarak tanam juga mempengaruhi kelembaban mikro di sekitar tanaman. Jarak ideal 70 cm x 40 cm memaksimalkan sirkulasi udara, sehingga daun tidak terlalu lembab. Selain itu, teknik polikultur, misalnya menanam cabai atau buncis di sela-sela kentang, membantu menekan tekanan penyakit sekaligus menambah diversifikasi penghasilan petani.

Panen dan pascapanen juga bagian dari pencegahan. Umbi yang disimpan dalam kondisi cahaya, suhu, dan kelembapan terkontrol memiliki risiko lebih kecil diserang patogen, menjaga kualitas panen sampai ke konsumen.

Teknis Pengendalian

Meski langkah pencegahan diterapkan, busuk daun bisa muncul. Pemangkasan daun bergejala menjadi cara pertama menekan penyebaran. Daun yang rusak sebaiknya segera dipotong dan dibakar atau dikubur jauh dari tanaman sehat.

Pengendalian biologis juga efektif. Trichoderma harzianum sebagai biofungisida pada konsentrasi 35 gram per liter mampu bersaing dengan patogen dan memperkuat pertahanan tanaman. Fungisida nabati, seperti ekstrak buah pinang merah 30 ml per ppm, memberi efek penghambatan tanpa merusak lingkungan.

Metode tradisional lain, penyemprotan asap cair dari tempurung kelapa, kayu, bonggol jagung, atau cangkang kemiri (25 cc per liter air), membantu menekan pertumbuhan jamur dan menciptakan kondisi mikro yang tidak bersahabat bagi spora.

Jika serangan parah, fungisida sintesis menjadi pilihan terakhir. Mancozeb 80% dengan dosis 3–4 gram per liter air efektif menghentikan perkembangan patogen, tetapi harus digunakan sesuai aturan agar tidak menimbulkan residu berlebihan pada umbi.

Pemantauan rutin menjadi kunci, setiap minggu, daun perlu diperiksa, terutama saat hujan deras atau kelembaban tinggi. Tanda awal seperti bintik hijau muda harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi lebih luas.

Pendekatan Integrated Disease Management (IDM) paling efektif. Dengan kombinasi sanitasi lahan, varietas tahan penyakit, perendaman benih, pemangkasan daun bergejala, dan penggunaan fungisida sesuai kebutuhan, risiko kerugian bisa diminimalkan. Tidak ada satu cara tunggal yang cukup, karena patogen adaptif dan cepat menyebar.

Teknik irigasi, jarak tanam, dan polikultur menciptakan ekosistem mikro yang kurang menguntungkan bagi patogen. Sehingga walau serangan terjadi, dampaknya tidak separah pada tanaman monokultur tanpa pengaturan kelembapan.

Penyimpanan yang tepat menjadi langkah terakhir. Umbi dikeringkan, disimpan di ruang berventilasi baik, suhu stabil, dan kelembapan terkendali. Ini menekan pertumbuhan patogen yang mungkin tersisa, menjaga kentang lebih lama sebelum dijual atau dikonsumsi.

Gsh (sumber BRMP Hortikultura)


TABLOID Sinar Tani
TABLOID SINARTANI.COM
SINTA TV
SELAMAT TAHUN BARU
2026
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja Sinar Tani atas kerja samanya telah memilih kami sebagai partner penyebaran informasi dan publikasi.
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PANGAN NASIONAL
BADAN GIZI NASIONAL
BAPPENAS
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
sinergi gula nusantara
PETROKIMIA GRESIK
PETROKIMIA KAYAKU
PUPUK KUJANG
Sang Hyang Seri
DPKP
BAPELTAN JAMBI
HKTI
JAPFA
Kapal Api
YANMAR
Aims
LORENTZ SOLAR PUMPING
PRIMASID
BENIH PERTIWI
EAST-WEST SEED
syngenta
TANIKAYA
PT RUTAN
FNC
ROMINDO PRIMAVETCOM
TRIBUANA
LAUTAN LUAS
FMC
Saprotan utama
DGW
ADVANTA
CV. AGRO JAYA INDONESIA
BASF
We create chemistry
BANK MESTIKA
YeSS
SIMURP
Terima Kasih...

Dialog dengan HKTI Ini Pesan Mentan

Di depan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengajak organisasi pertanian terbesar tersebut untuk bergerak bersama untuk kemajuan pertanian dan membantu meningkatkan kesejahteraan petani yang jumlahnya mencapai 115 juta orang.



"Jika petani untung, pasti negara kuat dan berdaulat. Petani itu sederhana, kalau untung mereka akan tanam lagi. Seperti sekarang, belum panen, petani sudah culik tanam. Jadi lahan yang sudah siap panen, petani panen sedikit untuk membuat pembibitan untuk persiapan musim tanam selanjutnya," katanya di Jakarta, Selasa (16/12).

Ke depan, kata Amran, pemerintah akan mendorong hilirisasi perkebunan dengan memberikan bantuan gratis di seluruh Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp 9,9 triliun. Misalnya, untuk komoditas kelapa pemerintah mengajak pelaku usaha, khususnya HKTI untuk membangun pabrik olahan kelapa. Contohnya di Maluku Utara, sudah ada pabrik ini kelapa yang sudah ekspor.

Dengan adanya pabrik, kelapa petani yang dulu harganya Rp 600 per butir, kini mencapai Rp 3.500 per butir atau naik hampir 500 persen. Bahkan jika diolah menjadi santan dan produk olahan lainnya, harga di negara tujuan ekspor bisa mencapai Rp 30 ribu atau 100 kali lipat.

Amran melihat ada pergeseran konsumsi pangan di Eropa justru menguntungkan Indonesia. Sebab, di negara-negara Eropa tidak bisa tumbuh kelapa, sementara Indonesia memproduksi 81 persen dari pasokan kelapa dunia. "Kalau kita hilirisasi dan ekspor kita bisa mendapatkan devisa hingga Rp 24 triliun," ujarnya.

Bukan hanya kelapa, Amran juga melihat potensi komoditas gambir cukup besar di pasar ekspor. Sebab, mayoritas pasar gambir di dunia dipasok Indonesia. Karena tu, pada kesempatan dialog dengan pengurus HKTI, Amran mengajak untuk berubah.

"Seseorang tidak akan berubah nasibnya, jika orang tersebut tidak mau berubah," katanya seraya berpesan agar dalam berusaha tidak mengganggu ekonomi rakyat kecil. Pasalnya, jika rakyat kecil (petani) terganggu, maka pangan juga akan terganggu .

Mata, Telinga dan Tangan Pemerintah

Pada kesempatan itu, Amran Sulaiman menegaskan HKTI akan menjadi mata, telinga, sekaligus tangan Kementerian Pertanian dalam mengawal swasembada pangan dan hilirisasi pertanian nasional. Bahkan HKTI se-Indonesia akan berperan sebagai ujung tombak pemerintah di lapangan, khususnya dalam memonitor dan mengontrol penyaluran seluruh bantuan pemerintah kepada petani.

Dengan jaringan yang langsung bersentuhan dengan petani, HKTI dinilai mampu menangkap persoalan riil yang selama ini kerap luput dari pantauan pusat. "Hari ini kita bersama HKTI se-Indonesia. Ini menjadi ujung tombak kita di lapangan untuk memonitor dan mengontrol seluruh bantuan pemerintah," ujar Amran.

Ke depan HKTI, Amran berharap ikut mengontrol langsung ke daerah-daerah, membantu petani, sekaligus memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran. Negara harus memiliki banyak mata dan telinga agar permasalahan petani dapat didengar lebih luas dan ditangani lebih cepat.

Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap kepengurusan baru HKTI yang dinilainya energik dan siap bergerak lincah. Dengan kepemimpinan yang ada, Amran optimistis HKTI mampu mengawal agenda besar Kementan, terutama swasembada pangan dan hilirisasi pertanian yang menjadi arahan Presiden RI.

Lebih jauh, Mentan Amran menyebut penguatan peran HKTI merupakan bagian dari mimpi besar membangun ekonomi yang berkeadilan. Ia menekankan, pentingnya pergeseran dari ekonomi neoliberal kapitalistik menuju ekonomi Pancasila, di mana hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. "Itu mimpi besar kita, semua rakyat Indonesia menikmati ekonomi ini," ujarnya.

Rumah Besar Petani

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum DPN HKTI periode 2025–2030, Sudaryono, menegaskan bahwa HKTI pada dasarnya adalah rumah besar petani. Karena itu, seluruh keluhan petani, mulai dari persoalan pupuk dan benih hingga dugaan pelanggaran hukum dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian, akan ditampung dan disampaikan kepada pemerintah.

"HKTI ini isinya petani. Jadi semua keluhan petani kita terima. Negara harus punya mata dan telinga yang banyak supaya tidak ada petani yang kita tinggalkan," kata Sudaryono. Bahkan lanjutnya, peran HKTI sebagai mitra strategis Kementan di lapangan diharapkan mampu memperkuat distribusi program pemerintah dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan petani di seluruh daerah.

HKTI juga menegaskan komitmennya untuk mengawal program strategis Kementerian Pertanian tahun 2026, terutama pada agenda hilirisasi komoditas perkebunan dan peningkatan produksi peternakan. Bahkan HKTI berinisiatif menjadi penghubung antara pemerintah dan petani di seluruh tingkatan, memastikan program pemerintah benar-benar sampai ke tingkat akar rumput tanpa celah informasi.

"HKTI hadir untuk memastikan tidak ada gap informasi antara pemerintah dengan petani di lapangan. Semua pemangku kepentingan harus berada dalam satu alur kerja agar program nasional berjalan efektif," kata Sudaryono.

HKTI siap mengerahkan jaringannya untuk memastikan pelaksanaan program negara berjalan lancar hingga ke desa-desa. "Kita harus pastikan semua yang mau terlibat, punya kemauan dan kemampuan ikut berperan, baik di hilirisasi perkebunan maupun di peningkatan produksi peternakan," ujarnya.

Dengan gerak yang makin terkoordinasi antara negara dan organisasi tani, Kementan dan HKTI berharap tahun 2026 menjadi momentum penting dalam penguatan ketahanan pangan dan kedaulatan komoditas strategis Indonesia. **Tim Sinta**

Usaha Ayam Petelur Bebas Sangkar jadi **Tuntutan Global**



Usaha budidaya ayam petelur kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi telur. Aspek kesejahteraan hewan menjadi perhatian penting seiring meningkatnya tuntutan konsumen dan pasar global.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian mulai mendorong penerapan sistem budidaya ayam petelur bebas sangkar atau *cage-free* sebagai bagian dari transformasi menuju peternakan yang adaptif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut ditandai melalui Sosialisasi Buku Pedoman Sistem Produksi Ayam Petelur Bebas Sangkar, hasil kolaborasi Kementan dengan Catalyst Thailand, yang digelar di Bandung, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai standar produksi *cage-free*, meningkatkan kapasitas teknis para pemangku kepentingan, serta membuka ruang diskusi agar penerapannya lebih efektif di lapangan.

Penerapan kesejahteraan hewan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 66 dan 67. Penjelasan selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan pasal 83 - 96.

Kesejahteraan ayam petelur diterapkan dengan memperhatikan lima prinsip kebebasan hewan atau yang dikenal dengan five freedom. Pertama, bebas dari lapar dan haus serta malnutrisi; mendapatkan akses air minum (add libitum) dan pakan yang cukup sesuai dengan kebutuhan fisiologis ayam petelur.

Kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Hal ini diterapkan dengan memberikan situasi lingkungan yang sesuai termasuk tempat tinggal yang istirahat yang nyaman. Ketiga, bebas dari sakit, cedera, dan penyakit; melakukan pencegahan, diagnosa, dan pengobatan yang tepat.

Keempat, bebas dari rasa takut dan stress. Untuk itu, memastikan ayam petelur terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan penderitaan bagi ayam. Kelima, bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Peternak harus menyediakan ruangan yang cukup, fasilitas yang memadai sesuai dengan bangsa ayam.

Pedoman Teknis

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada mengapresiasi Catalyst sebagai mitra teknis yang berperan aktif dalam penyusunan pedoman tersebut. Pedoman ini disusun sebagai respons atas dinamika industri perunggasan global yang semakin menekankan aspek keamanan pangan, keberlanjutan, dan kesejahteraan hewan.

Menurutnya, industri perunggasan Indonesia terus tumbuh signifikan. Namun, seiring meningkatnya kesadaran konsumen dan tuntutan pasar global, dibutuhkan rujukan teknis dan standar operasional yang mampu menjawab kebutuhan tersebut.

"Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan sistem produksi ayam petelur bebas sangkar secara tepat dan berkelanjutan," ujar Hary.

Ia menjelaskan, meningkatnya komitmen global terhadap penggunaan telur *cage-free* membawa implikasi langsung bagi pasar domestik sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha nasional untuk meningkatkan daya saing. Karena itu, kehadiran pedoman resmi dinilai penting untuk memberikan kepastian standar, tata kelola produksi, serta praktik terbaik yang dapat diadaptasi secara bertahap sesuai kondisi teknis dan sosial-ekonomi di lapangan.

"Pedoman ini memperhatikan aspek biologis, teknis, sosial-ekonomi, hingga keberlanjutan lingkungan. Lebih dari itu, dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi industri perunggasan nasional menuju sistem produksi yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pasar," tuturnya.

Sementara itu, President of Catalyst Co. Ltd., Wadchara Pumpradit, menilai peluncuran pedoman *cage-free* sebagai langkah penting dan inspiratif. Menurutnya, Indonesia menunjukkan kepemimpinan nyata di kawasan dalam pengembangan standar kesejahteraan hewan dan pertanian berkelanjutan.

Dengan adanya pedoman ini, menurutnya, Indonesia telah meletakkan fondasi kuat bagi pengembangan standar dan sertifikasi sistem produksi ayam petelur bebas sangkar ke depan. Ini tidak hanya membanggakan bagi Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi tolok ukur bagi negara-negara di kawasan ASEAN," katanya.

Dari kalangan akademisi, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Indrawati Yudha Asmara, mengungkapkan bahwa tantangan utama penerapan sistem *cage-free* terletak pada manajemen lingkungan, nutrisi, dan biosekuriti.

Untuk itu, integrasi pendekatan ilmiah dengan pemanfaatan teknologi, seperti *Internet of Things* (IoT) dan kecerdasan buatan, menjadi kunci menjaga kesehatan ternak sekaligus mengoptimalkan produktivitas.

Sebenarnya tren internasional menunjukkan pergeseran besar menuju sistem cage-free sejak 2015. Hingga akhir 2021, lebih dari 2.000 perusahaan global, termasuk restoran, hotel, dan ritel telah berkomitmen menggunakan telur *cage-free*.

Di Indonesia sendiri, sekitar 100 perusahaan sudah mengumumkan langkah serupa. Beberapa perusahaan besar yang berkomitmen antara lain Nestlé, KFC, Pizza Hut, Burger King, Taco Bell, dan The Coffee Bean & Tea Leaf, yang menargetkan penggunaan telur cage-free sepenuhnya pada 2025.

Selain ramah hewan, sistem *cage-free* juga terbukti lebih aman dari sisi kesehatan pangan. *European Food Safety Authority* (EFSA) mencatat, risiko *salmonella* pada sistem kandang baterai jauh lebih tinggi dibandingkan sistem cage-free. Hal ini menegaskan bahwa perubahan ke arah *cage-free* bukan hanya tren, tapi juga langkah strategis menuju keamanan pangan yang lebih baik. **Herman/Yul**

Jelang Nataru, Paket Pangan Murah untuk Ojol

Menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) Kementerian Koordinator bidang Pangan bersama Perum Bulog menyediakan paket pangan murah kepada para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung di Grab dan Gojek dengan harga Rp 100 ribu. Dalam setiap paket terdiri dari beras premium 5 kg, gula 1 kg, tepung terigu 1 kg, dan minyak goreng 1 liter.



Kegiatan yang dilaksanakan di Gudang BULOG Sangiang Periuk, Kota Tangerang, Banten, Kamis (18/12) diluncurkan Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani.

Hadir juga Wali Kota Tangerang Sachrudin, CEO GoTo Hans Patuwo, CEO Grab Neneng Goenadi, serta Anggota DPR RI Okta Kumala Dewi dan Deputi Bidang Koordinasi dan Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono.

Pada kesempatan tersebut, Zulkifli mengatakan, penyediaan pangan murah untuk pengemudi ojol merupakan hasil kolaborasi dengan Bulog, Grab dan Gojek. Produk pangannya berasal dari Bulog, sedangkan dananya berasal dari Kemenko Pangan dan Grab-Gojek.

"Kalau mau penyediaan pangan murah ini diadakan di tiap kota juga boleh agar meringankan para pengemudi ojol. Karena ini kan mau Nataru, terus nanti Lebaran. Jadi bisa membantu meringankan. Mudah-mudahan bermanfaat," kata Zulkifli.

Deputi Bidang Koordinasi dan Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono menambahkan, program ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengemudi ojek online sebagai salah satu ujung tombak distribusi pangan dan layanan masyarakat sehari-hari.

"Program pangan murah ini didedikasikan untuk komunitas ojek online sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis mereka. Paket pangan yang seharusnya bernilai sekitar Rp 190.000 dapat diperoleh dengan harga Rp100.000, bahkan sebagian diberikan secara gratis melalui dukungan GOJEK dan GRAB," tutur Tatang.

Ia menambahkan, kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai kota lainnya. Setelah Tangerang, program serupa akan dilanjutkan di Semarang dan kota-kota lain, dengan menjangkau berbagai komunitas masyarakat. Untuk wilayah Tangerang disediakan sebanyak 1.000 paket. "Nantinya dimana tempat kita akan mengadakan kerjasama, disitulah kita akan menggandeng Bulog untuk penyediaan pangan murah," ujarnya.

Tatang mengatakan, kerjasama penyediaan pangan murah ini juga terbuka dengan komunitas lain. "Hari ini dan mungkin besok itu masih komunitas ojol. Nanti mungkin saja komunitas Bajay atau Bentor. Mungkin saja komunitas marbot masjid atau pembersih sampah," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan komitmen BULOG dalam mendukung penuh program sinergi lintas kementerian dan mitra strategis ini. Program ini merupakan wujud sinergi antara BULOG, Kemenko Pangan, serta mitra swasta.

"Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, termasuk mitra pengemudi ojek online, untuk memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau," jelasnya.

Rizal mengatakan, pihaknya akan terus mendukung program-program stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, tidak hanya menjelang Nataru, tetapi juga menghadapi periode penting lainnya seperti Imlek, Ramadhan, dan Idulfitri.

"BULOG berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Saat ini stok beras BULOG berada pada posisi yang aman dan harga pangan secara umum terpantau stabil sesuai HET," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, BULOG bersama Kemenko Pangan, GOJEK, dan GRAB berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi mitra pengemudi ojek online sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. **Yul**

Mentan: Naikkan Harga, Saya Buat Vertigo



Pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemerintah tidak akan ragu bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja menaikkan harga dan merugikan rakyat.

"Saya tidak menularkan penyakit, tapi yang menaikkan harga, saya pastikan saya 'vertigokan'. Percaya sama saya," tegas Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman usai Rapat Koordinasi Stabilisasi Pengendalian Pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru di Jakarta, Kamis (18/12).

Dalam pertemuan itu, pemerintah dan pelaku usaha sepakat menjaga harga tetap sesuai ketentuan. "Kita bersama seluruh asosiasi yang bergerak di bidang pangan sepakat, jangan ada menjual harga di atas HET. Itu kesepakatan kita yang pertama. Yang kedua, kita tetap menjaga harga di tingkat konsumen," ujar Amran.

Amran yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan masa imbauan telah berakhir. Pemerintah kini akan mengedepankan langkah tegas melalui pengawasan dan penindakan langsung di lapangan. "Saya sampaikan semua jangan melanggar HET. Jika melanggar HET, kita tindak. Bukan lagi imbauan. Masa imbauan sudah selesai. Kalau melanggar HET, kita tindak dan Satgas Pangan langsung turun," ujarnya.

Penegakan HET menurut Amran, didukung kondisi pasokan pangan nasional yang sangat mencukupi. Seluruh komoditas strategis dipastikan aman, sehingga tidak ada alasan harga melonjak. "Semua stok lebih dari cukup. Ayam, telur, daging cukup. Yang paling penting beras, alhamdulillah bahkan harganya turun. Minyak goreng juga cukup, bahkan lebih dari cukup karena kita produsen terbesar dunia," jelasnya.

Ia menyebut seluruh asosiasi pangan telah menyatakan komitmen yang sama, yakni menjaga pasokan dan harga tetap stabil selama momentum Nataru. Semua asosiasi mengatakan stok cukup. "Saya katakan tegas, enggak boleh naik. Kalau naik, kita tindak," ujarnya.

Amran menegaskan kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan seluruh rantai pangan, mulai dari hulu hingga hilir. Pemerintah ingin petani tetap sejahtera, pedagang memperoleh keuntungan wajar, dan konsumen tidak dirugikan. "Kesimpulannya jelas, petani bahagia, pedagang untung, konsumen tersenyum. Itu kesepakatan kita," kata Amran.

Pemerintah juga memastikan pengawasan akan diperketat selama periode Natal dan Tahun Baru, guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga. **Yul**


TABLOID Sinar Tani
SINARTANI.COM
SINTA TV
open
SOCIAL MEDIA ADVERTISING !!
tabloidsinartani
tabloidsinartani.com
2.486 posts
7.355 followers
648 following
@tabloidsinartani
tabloidsinartani.com
Followed by kyrie_304
Following
Message
Contact
EDISI 4109
EDISI 4107
EDISI KHUSUS HK
11.19
Informasi PERTANIAN Terkini
SINTATV
@SINTATV
tabloidsinartani.com and 1 more link
Subscribed
Videos
Shorts
Live
Podcasts
Latest
Popular
Oldest
"Keracunan Anggur", Ubah Hidup Aat
465 views · 10 days ago
SINTATV
Benefit :
• Jangkau Tanpa Batas!
• Tepat Sasaran, Tepat Waktu!
• Raih Engagement Tinggi
(021) 7812162
081317575066
redaksi@sinartani.co.id